

Katalog: 9101009.34



ANALISIS ISU TERKINI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**ANALISIS
ISU TERKINI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2019**

Analisis Isu Terkini Daerah Istimewa Yogyakarta 2019

ISBN:

No. Publikasi: 34550.1908

Katalog: 9101009.34

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman: viii + 58 Halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyedia Data:

Bidang Statistik Distribusi

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Gambar Kulit:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dicetak oleh:

CV. Magna Raharja Tama (MAHATA) Yogyakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Heru Margono

Editor

Mainil Asni

Penulis I

Mutjo
Meitri Pafrida

Penulis II

Kusriatmi
Siti Maysaroh

Penulis III

Mutjo
Waluyo

Penulis IV

Mutjo
Waluyo

Pengolah Data

Mutjo
Meitri Pafrida

Pengolah Data

Kusriatmi
Siti Maysaroh

Pengolah Data

Mutjo
Waluyo

Pengolah Data

Mutjo
Waluyo

Desain Gambar Kulit

Mutjo

Desain dan Tata Letak Layout

Mutjo

Kata Pengantar

Analisis Isu Terkini Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menyajikan gambaran beberapa fenomena yang terjadi selama tahun 2018-2019 atau kondisi yang mungkin berkembang di tahun mendatang. Publikasi ini membahas empat tema. Tema pertama tentang Perkembangan Indikator Makro Ekonomi, sebagai *overview* pembangunan ekonomi makro di DIY hingga 2019. Indikator yang dibahas mencakup juga perkembangan harga konsumen sebagai cerminan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, pengangguran, dan kemiskinan yang mencirikan capaian pembangunan sosial ekonomi.

Tema kedua tentang gambaran investasi yang disajikan dalam pembahasan dengan judul Analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Tema ini membahas perkembangan investasi, struktur investasi menurut lapangan usaha, dan angka ICOR. Dalam bab ini dibahas pula mengenai kebutuhan dan pilihan investasi di masa mendatang sebagai bahan yang dapat dipertimbangkan untuk rumusan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Tema ketiga tentang kesenjangan pendapatan yang digambarkan melalui indikator kesenjangan pendapatan antarpenduduk dan kesenjangan pendapatan antarwilayah untuk melihat sejauh mana sebaran pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh penduduk dan wilayah di DIY.

Tema keempat pembangunan manusia yang membahas capaian pembangunan sumber daya manusia yang berupa indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tema yang dibahas selain perkembangan IPM juga dilihat perkembangan indikator-indikator penyusunnya, yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberi masukan dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, Desember 2019

Kepala

Badan Pusat Statistik Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Dr. Heru Margono, M.Sc.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
TEMA 1	
Perkembangan Indikor Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta	1
1. Tren Pertumbuhan Ekonomi	3
2. Sebaran Pertumbuhan Ekonomi	7
3. Perbandingan Laju Inflasi Yogyakarta dan Nasional	9
4. Perkembangan Angka Pengangguran.....	11
TEMA 2	
Investasi sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi.....	15
1. Perkembangan Nilai Investasi	17
2. Struktur Investasi	18
3. Angka ICOR DIY	21
4. ICOR Lapangan Usaha untuk Arah Kebijakan Pembangunan Sektoral	25
4. Kebutuhan dan Pilihan Investasi Mendatang	27
TEMA 3	
Ketimpangan dan Kemiskinan	35
1. Ketimpangan Pendapatan	37
2. Ketimpangan Antarwilayah	39
3. Kemiskinan	40
TEMA 4	
Derajat Pembangunan Manusia	45
1. Perkembangan dan Posisi Pembangunan Manusia DIY	47
2. Kualitas Hidup	49
3. Kualitas Pengetahuan	49

4. Standar Hidup Layak	50
5. Capaian IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY	50
6. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemajuan Pembangunan Manusia	51

<https://yogyakarta.bps.go.id>

TEMA 1
PERKEMBANGAN
INDIKATOR MAKRO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

<https://yogyakarta.bp.go.id/>

TEMA 1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Indikator strategis yang digunakan untuk mengevaluasi pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk kebijakan dan perencanaan pembangunan mendatang di antaranya adalah inflasi, ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas bila mampu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja yang luas atau memperkecil angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi sasaran target dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan bila ternyata belum mampu menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata baik kepada penduduk maupun wilayahnya. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup baik bila belum mampu mendorong berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Sehingga, sasaran dan program pembangunan seharusnya juga diiringi dengan target capaian pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran.

1. Tren Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk merepresentasikan fenomena ekonomi makro suatu negara maupun wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bermakna perkembangan kesejahteraan suatu negara atau wilayah, yang tercermin pada peningkatan output per kapita sehingga mendorong atau memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, atau dalam bahasa lain meningkatkan daya beli masyarakat.

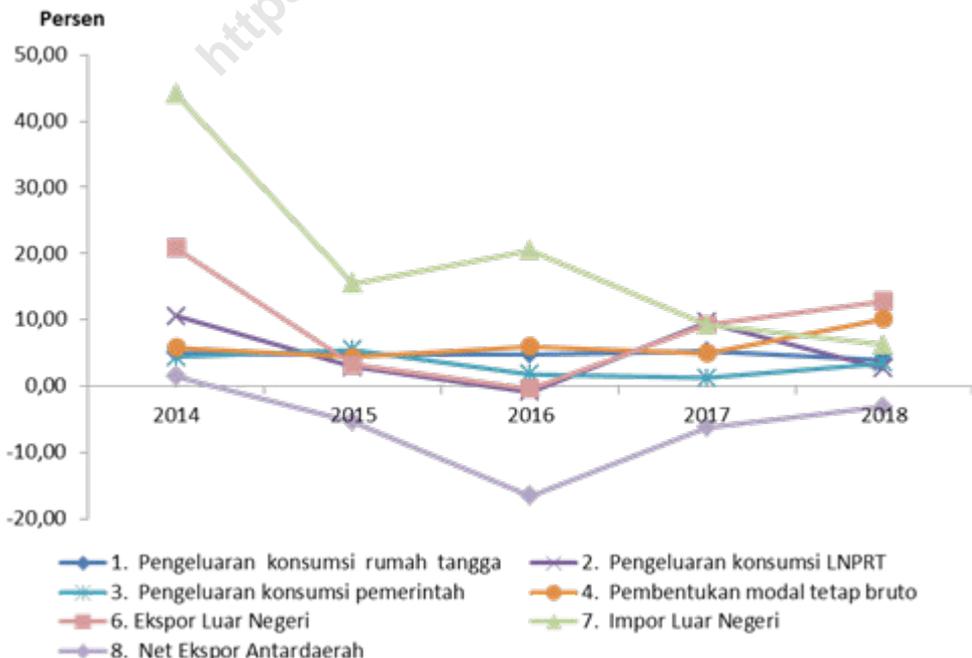
Selama kurun waktu 2014-2018, pertumbuhan ekonomi DIY sudah pada kondisi tren yang menggembirakan. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5,36 persen per tahun, tetapi arah pertumbuhan ekonomi DIY dalam dua tahun terakhir sudah menunjukkan peningkatan.

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi menurut kategori tampak masih terjadi fluktuasi yang relatif tinggi dan bahkan kategori pertanian mengalami kontraksi pada tahun tersebut. Kondisi perekonomian DIY mulai ke arah pertumbuhan yang kondusif sejak tahun 2015, hal ini ditunjukkan oleh perkembangan semua lapangan usaha yang tumbuh positif dan berlanjut hingga tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam recovery ekonomi menunjukkan hasilnya, meskipun belum

komponen utama, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri, dan ekspor antardaerah netto. Menurut Eachern (2000: 149) untuk memahami pendekatan PDRB sisi pengeluaran, agregat sembilan komponen tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran/pembelian pemerintah, dan ekspor netto. Oleh karena itu dalam pembahasan ini pengamatan tren pertumbuhan PDRB sisi pengeluaran difokuskan pada empat komponen tersebut.

Pertumbuhan komponen-komponen pengeluaran selama periode 2014-2018 terlihat menunjukkan arah perkembangan yang lebih baik. Pada tahun 2018 pertumbuhan lebih banyak dikendalikan oleh kegiatan pembentukan modal tetap bruto, ekspor luar negeri, dan impor luar negeri. Meskipun berperan mengendalikan pertumbuhan ekonomi DIY, tetapi peran komponen impor dalam dua tahun terakhir sudah mengalami pergeseran. Impor luar negeri merupakan faktor pengurang dalam PDRB. Bila impor luar negeri tidak dikondisikan dengan baik dalam jangka panjang akan mempengaruhi cadangan devisa DIY. Ekspor luar negeri yang diharapkan menjadi andalan perdagangan DIY, selama dua tahun terakhir sudah mulai menunjukkan peningkatan untuk mengimbangi kebutuhan arus masuk barang dan jasa dari luar negeri. Setelah mengalami kontraksi di 2016, ekspor luar negeri DIY tahun 2018 tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 12,82 persen. Sementara itu, kinerja pertumbuhan ekspor antar daerah DIY masih sering mengalami kontraksi.

Gambar 1.2.
Pertumbuhan Komponen Pengeluaran (persen), 2014-2018



Dengan demikian, dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi DIY digerakkan oleh semua komponen. Selama kurun waktu 2014-2018 pertumbuhan ekonomi pada kisaran angka 4,95 hingga 6,20 persen per tahun. Meskipun pertumbuhannya tidak tinggi namun relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,36 persen. Rata-rata pertumbuhan ini masih sedikit lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan periode 2013-2017 yang sebesar 5,11 persen.

Dari sisi pengeluaran, tren pertumbuhan ekonomi juga mencatatkan bahwa DIY masih menjadi ladang pemasaran produk luar provinsi baik dari hasil produk pertanian maupun industri pengolahan. Hal ini menyangkut kebutuhan komoditas dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lain yang harus disuplai dari luar provinsi karena produksi lokal tidak mencukupi. Sementara dari industri pengolahan penyebab tingginya impor ditengarai dari bahan baku industri besar-sedang dan juga industri mikro-kecil DIY yang didatangkan dari luar provinsi bahkan harus impor dari luar negeri, seperti bahan kerajinan perak.

2. Sebaran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada level provinsi pada hakikatnya merupakan agregasi atau gabungan dari pertumbuhan semua wilayah kabupaten/kota yang berada di bawahnya. Setiap kabupaten/kota memiliki andil atau kontribusi pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan ukuran ekonomi maupun tingkat perubahannya. Besarnya andil pertumbuhan juga sangat ditentukan oleh arah kebijakan pembangunan yang dijalankan apakah terpusat di suatu wilayah tertentu atau tersebar secara merata di seluruh wilayah.

Kontribusi setiap kabupaten/kota terhadap struktur perekonomian DIY 2014-2018 cukup bervariasi. Secara umum, Kabupaten Sleman memiliki kontribusi nilai tambah terbesar dengan proporsi mencapai 33,72 persen terhadap total PDRB DIY 2018 dan diikuti oleh Kota Yogyakarta sebesar 26,03 persen. Kedua wilayah ini memiliki ukuran ekonomi yang paling besar, karena aktivitas perekonomian DIY terpusat di kedua wilayah. Sementara, Kabupaten Kulon Progo tercatat memiliki ukuran ekonomi paling kecil dengan kontribusi sebesar 7,91 persen terhadap perekonomian DIY tahun 2018.

Sebaran pertumbuhan yang dicapai oleh seluruh kabupaten/kota memiliki pola yang cukup bervariasi. Kabupaten Sleman tercatat menjadi wilayah yang selalu memiliki pertumbuhan ekonomi di atas level DIY. Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul selalu menjadi wilayah yang pertumbuhan ekonominya di bawah level DIY. Perubahan pola pertumbuhan ekonomi terjadi selama periode 2017-2018. Kabupaten Kulon Progo yang pertumbuhannya selama 2014-2016 selalu lebih rendah dari level DIY, mulai tahun 2017-2018 mampu melejit di atas level pertumbuhan DIY. Bahkan, pertumbuhan selama periode tersebut tercatat paling tinggi di DIY dan mampu menembus angka dua digit yakni 10,62 persen di tahun 2018. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya aktivitas investasi terutama pembangunan bandar udara Yogyakarta International Airport (YIA). Aktivitas pembangunan ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi DIY hingga mencapai level paling tinggi selama lebih dari dua dekade terakhir. Secara statistik, dampak lanjutan dari aktivitas pembangunan YIA adalah akan meningkatnya PDRB per

kapita Kulon Progo baik nominal maupun riil. Namun, seberapa besar manfaat yang mampu dinikmati oleh penduduk Kulon Progo sangat tergantung dari seberapa besar keterlibatan mereka dalam aktivitas pembangunan tersebut. Apakah posisinya hanya sebagai penonton atau mampu menjadi bagian dari proses.

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2018 (Persen)

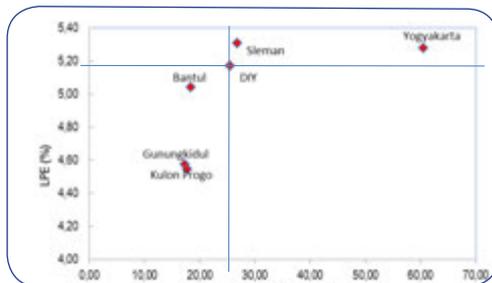
Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017		2018	
	Pertumbuhan	Andil								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulon Progo	4,57	0,35	4,62	0,34	4,76	0,35	5,97	0,45	10,62	0,81
Bantul	5,04	0,96	4,97	0,91	5,06	0,94	5,10	0,95	5,48	1,03
Gunungkidul	4,54	0,62	4,82	0,63	4,89	0,65	5,00	0,66	5,13	0,69
Sleman	5,30	1,81	5,18	1,72	5,25	1,75	5,35	1,80	6,38	2,18
Yogyakarta	5,28	1,43	5,09	1,34	5,11	1,36	5,24	1,40	5,48	1,49
DIY	5,17		4,95		5,05		5,26		6,20	

Andil pertumbuhan yang disumbang oleh semua kabupaten/Kota selama periode 2014-2018 juga cukup bervariasi. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menjadi dua wilayah yang memiliki andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Andil kedua wilayah masing-masing tercatat sebesar 2,18 dan 1,49 poin persen terhadap pertumbuhan DIY 2018 (Tabel 1.1). Andil pertumbuhan terbesar berikutnya disumbang oleh Kabupaten Bantul. Kabupaten Kulon Progo yang selalu memiliki andil pertumbuhan paling rendah, mulai tahun 2018 mampu melampaui Kabupaten Gunungkidul. Peningkatan andil ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang mampu tumbuh dua digit.

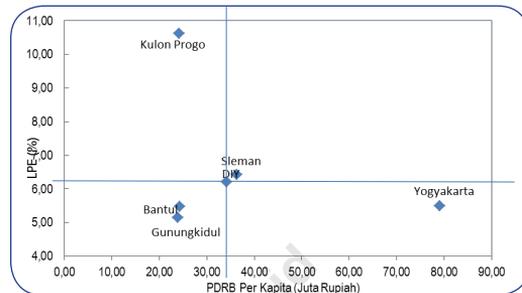
Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran wilayahnya. Perlu ditinjau lebih jauh sebaran dan tingkat kesenjangan sebaran pertumbuhannya. Salah satu ciri disebut mempunyai pertumbuhan ekonomi berkualitas bila sebaran pertumbuhan relatif merata di wilayah cakupannya dan tidak ada perbedaan yang mencolok tingkat pendapatan penduduknya. Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah pada periode 2014–2018 dapat dilihat dari posisi masing-masing kabupaten/kota terhadap DIY pada bidang pencaran (scattered plot) yang semula diperkenalkan oleh Klassen dengan sebutan Tipologi Klassen. Berdasar pada metode Tipologi Klassen ini, laju pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita kabupaten/kota dapat dipetakan dan hasilnya seperti yang terlihat pada Gambar 1.3a. dan Gambar 1.3b.

Pada tahun 2014, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman berada pada kuadran I, yang berarti menjadi daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo berada pada kuadran III yang merupakan daerah tertinggal dalam lingkup perbandingan lokal DIY. Meskipun Sleman berada di kuadran

Gambar 1.3a.
Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014



Gambar 1.3b.
Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018



I bersama Kota Yogyakarta sebagai daerah yang maju dan cepat tumbuh, namun posisi Sleman masih rentan karena di ambang batas bawah.

Pada tahun 2018 Kulon Progo melesat naik di kuadran IV yaitu menjadi daerah yang berkembang cepat karena laju pertumbuhannya meloncat melampaui rata-rata provinsi meskipun PDRB per kapita Kulon Progo masih di bawah rata-rata provinsi. Sementara Kabupaten Sleman posisinya tetap di Kuadran I yaitu daerah yang maju dan cepat tumbuh. Selama lima tahun terakhir Kota Yogyakarta menjadi daerah yang maju tetapi tertekan karena mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga rata-rata pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata. Posisi Gunungkidul dan Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir stagnan pada kategori daerah tertinggal meskipun level pertumbuhan ekonominya bergerak ke atas mendekati rata-rata provinsi.

Skema Tipologi Klassen menurut kabupaten/kota wilayah DIY di atas menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Beberapa mega proyek sudah dalam proses berjalan, seperti pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo melesat di atas pertumbuhan semua kabupaten/kota di DIY. Pergerakan dari tahun 2014 ke 2018 tersebut mengindikasikan kesenjangan antarwilayah mulai dapat ditekan, dengan menggerakkan sumber pertumbuhan untuk Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Hanya saja, untuk PDRB per kapita masih terdapat ketimpangan yang lebar terutama dengan Kota Yogyakarta. Dengan demikian hingga tahun 2018 ini pembangunan sudah dapat berhasil meningkatkan level ekonomi karena laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota makin tinggi namun masih menyisakan kesenjangan pendapatan penduduk antarwilayah.

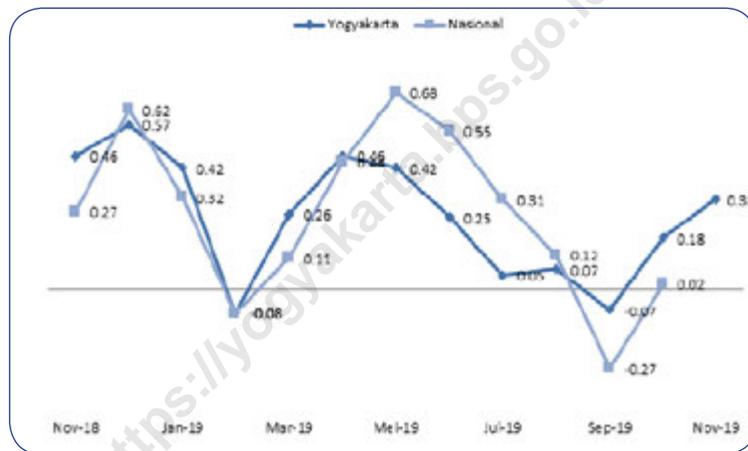
3. Perbandingan Laju Inflasi Yogyakarta dan Nasional

Kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat pada dasarnya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi di daerah. Sehingga, perkembangan IHK dan inflasi secara nasional tidak terlepas dari perkembangan IHK dan inflasi di daerah. Berikutnya,

pada bab ini akan dibahas perkembangan inflasi dengan mengulas secara deskriptif perkembangan inflasi nasional dan analisa tentang perkembangan inflasi Kota Yogyakarta secara umum. Adapun perkembangan inflasi Yogyakarta dan Indonesia selama kurun waktu tahun 2008-2018 dapat dilihat pada Gambar 1.4.

Jika dilihat series inflasi setahun terakhir (November 2018-November 2019), inflasi nasional relatif rendah meskipun berfluktuasi. Demikian pula dengan Kota Yogyakarta. Tren fluktuasi inflasi Kota Yogyakarta sedikit lebih rendah, namun menunjukkan pergerakan yang seirama. Hanya saja selama tiga bulan terakhir (September-November)

Gambar 1.4.
Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta dan Inflasi Nasional, 2018 – 2018 (persen)



Tabel 1.2.
Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019

Kelompok Pengeluaran	IHK (2012=100)			Inflasi Oktober 2019 *)	Inflasi Kalender 2019**)	Inflasi Tahun ke Tahun 2019**)
	Oktober 2018	Desember 2018	Oktober 2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	131,06	131,81	134,84	0,31	2,30	2,88
1. Bahan Makanan	145,56	147,42	151,30	0,86	2,63	3,94
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	131,76	132,11	135,11	0,05	2,27	2,54
3. Perumahan	133,23	133,74	136,37	0,18	1,97	2,36
4. Sandang	125,08	125,39	132,54	-0,01	5,70	5,96
5. Kesehatan	124,04	124,31	130,41	0,88	4,91	5,14
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	116,38	116,5	121,10	0,00	3,95	4,06
7. Transportasi dan Komunikasi	125,74	126,84	126,32	0,23	-0,41	0,46

*) Persentase perubahan IHK November 2019 terhadap bulan Oktober 2019

***) Persentase perubahan IHK November 2019 terhadap bulan Desember 2018

****) Persentase perubahan IHK November 2019 terhadap bulan November 2018

inflasi Kota Yogyakarta lebih tinggi dari nasional. Baik nasional maupun Kota Yogyakarta selama setahun terakhir terjadi dua kali deflasi, yaitu di bulan Februari dan September 2019. Pada tingkat nasional, inflasi tertinggi tercatat pada bulan Maret 2019. Sementara di Kota Yogyakarta tertinggi di bulan Desember 2018.

Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi hingga bulan November 2019, baik inflasi kalender maupun tahunan adalah sandang, disusul kesehatan dan pendidikan, rekreasi dan olah raga. Sementara itu, kelompok bahan makanan dan makanan jadi relatif terkendali. Hal ini bermakna bahwa persediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat terjaga dengan aman. Dukungan iklim konsumsi yang membaik ditunjukkan pula oleh terjaganya inflasi di kelompok pengeluaran perumahan. Hingga November 2019, inflasi kelompok perumahan tidak menembus 2 persen.

Meskipun demikian bila inflasi yang rendah berlangsung lama juga tidak baik karena mencerminkan kelesuan perekonomian akibat lemahnya daya beli masyarakat. Walhasil, aktivitas ekonomi menjadi kurang produktif. Melihat perkembangan inflasi hingga November nampaknya inflasi 2019 tidak akan sampai melebihi 3 persen. Oleh karena itu, agar aktivitas ekonomi dapat bergairah lagi di 2020 maka Kota Yogyakarta membutuhkan pergerakan inflasi yang lebih tinggi dibanding 2019.

Terkendalnya inflasi di Kota Yogyakarta dibandingkan inflasi nasional didukung oleh terjaganya 7 komponen inflasi. Hal ini tidak terlepas dari beragam upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY dalam menjaga stabilitas inflasi sepanjang tahun. TPID juga berupaya mengoptimalkan operasi pasar BULOG DIY dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY di titik distribusi utama baik di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperpendek arus distribusi pangan.

4. Perkembangan Angka Pengangguran

Jumlah penduduk usia bekerja atau usia 15 tahun ke atas di DIY pada Agustus 2019 mencapai 3,02 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 1,15 persen dibanding keadaan pada Agustus 2018 yang sebanyak 2,99 juta orang atau bertambah 34,3 ribu orang. Bertambahnya penduduk usia bekerja tersebut juga diikuti oleh peningkatan jumlah angkatan kerja, yaitu bertambah sebanyak 12,2 ribu orang, atau terjadi peningkatan sebesar 0,56 persen. Jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan sebanyak 0,77 persen, yaitu dari 2,12 juta orang menjadi 2,13 juta orang.

Selain dari indikator tersebut, profil tenaga kerja dapat juga diamati dari penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Sampai dengan Agustus 2019, sektor dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar adalah pertanian sebesar 19,01 persen, perdagangan 18,96 persen, dan industri pengolahan 17,05 persen (BPS, Sakernas Agustus 2019).

Dua indikator yang juga krusial mencerminkan perkembangan ketenagakerjaan adalah tingkat kesempatan kerja (TKK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dua indikator tersebut dibangun dari data-data yang sama. TKK merupakan rasio dari jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja, sedangkan TPT adalah rasio dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Oleh karena itu makna perkembangan dari dua indikator ini berlawanan arah. Selama tiga tahun terakhir,

Tabel 1.3.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama,
Agustus 2017 – Agustus 2019

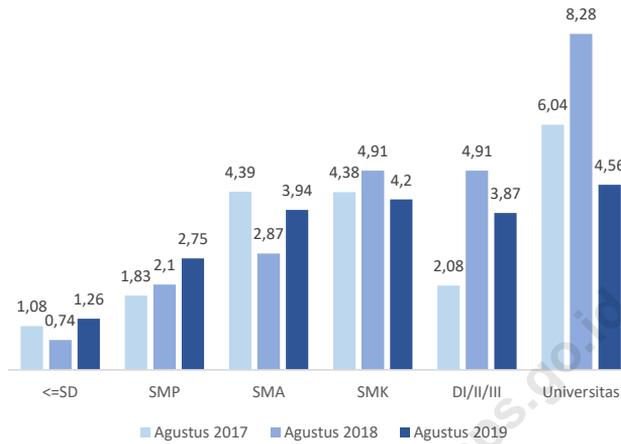
Status Keadaan Ketenagakerjaan	Satuan	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja	Ribu Orang	2.960,20	2987,33	3.021,65
Angkatan Kerja	Ribu Orang	2.117,19	2.191,74	2.203,92
Bekerja	Ribu Orang	2.053,17	2118,39	2.134,75
Pengangguran	Ribu Orang	64,02	73,35	69,17
Bukan Angkatan Kerja	Ribu Orang	843,02	795,59	817,73
Sekolah	Ribu Orang	266,87	247,19	265,78
Mengurus rumah tangga	Ribu Orang	472,11	452,31	453,38
Lainnya	Ribu Orang	104,04	96,09	98,57
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,02	3,35	3,14
Perkotaan	Persen	3,61	4,07	3,78
Perdesaan	Persen	1,66	1,60	1,52

TKK turun dari 96,98 persen di tahun 2017 menjadi 96,65 persen di 2018 dan naik lagi menjadi 96,86 persen di 2019. Di sisi lain, TPT 2018 naik menjadi 3,35 persen dari 3,02 persen di 2017, bergerak turun lagi menjadi 3,14 persen di 2019.

Menurut klasifikasi wilayah perdesaan dan perkotaan, tingkat pengangguran di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. TPT perdesaan dan perkotaan tahun 2019 masing-masing sebesar 1,52 persen dan 3,78 persen. Baik perdesaan maupun perkotaan kondisinya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Banyak faktor yang menyebabkan TPT perdesaan lebih rendah dibanding perkotaan. Di antaranya lapangan usaha di daerah perdesaan didominasi oleh pertanian dan penduduk di perdesaan lebih dominan orang-orang yang sudah tetap pekerjaannya yaitu di sektor pertanian. Penduduk usia kerja di perdesaan juga lebih dominan merupakan kelompok bukan angkatan kerja yaitu mereka yang masih sekolah dan ibu rumah tangga. Bahkan, untuk musim-musim tertentu kelompok bukan angkatan kerja bisa masuk menjadi angkatan kerja karena menjadi pekerja keluarga di saawah/ladang. Selain itu, usia kerja yang sudah tamat sekolah cenderung melakukan urbanisasi untuk mencari kerja di kota. Sementara di perkotaan penduduknya kompleks karena mereka yang mencari kerja tentunya lebih banyak di perkotaan.

Disagregasi TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjelaskan bahwa tingkat pengangguran cenderung tinggi untuk mereka yang berpendidikan SMA ke atas dan cenderung rendah untuk mereka yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah). Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain karena mereka yang tingkat pendidikan lebih rendah cenderung akan menerima pekerjaan apa saja yang penting bekerja. Sementara yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pilihan, ketika kesempatan kerja tersedia, belum tentu yang berpendidikan SLTA ke atas akan menangkap kesempatan tersebut kalau dirasa tidak sesuai dengan level pendidikan dan

Gambar 1.5.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2017 – Agustus 2019 (Persen)



keterampilannya. Oleh karena itu, pengangguran cenderung lebih banyak di kelompok pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai catatan, bahwa Survei Angkatan Kerja Nasional dengan jumlah sampel yang besar dilakukan di bulan Agustus. Di bulan tersebut ada sebagian kelompok orang yang baru saja menyelesaikan pendidikannya, tetapi tidak berencana untuk melanjutkan ke level pendidikan di atasnya karena merasa sudah cukup atau karena alasan biaya atau karena alasan lainnya. TPT kondisi Agustus 2019 dibanding tahun sebelumnya untuk kelompok pendidikan SMK, DI/II/III, dan universitas terjadi penurunan. Bahkan untuk kelompok universitas turun drastis, dari 8,28 persen menjadi 4,56 persen. Penurunan ini memberikan kontribusi secara signifikan terhadap turunnya TPT DIY tahun 2019.

TEMA 2
INVESTASI SEBAGAI
PENGUNGKIT PERTUMBUHAN
EKONOMI

<https://yogyakarta.bp.com>

TEMA 2

Investasi sebagai Pengungkit Peretumbuhan

1. Perkembangan Nilai Investasi

Besarnya investasi dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya. Produktivitas marginal adalah tambahan output yang diperoleh pada setiap tambahan satu unit kapital dalam proses produksi dengan faktor produksi yang lain konstan (*ceteris paribus*). Investasi akan dilakukan apabila produktivitas investasi masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga yang akan diterimanya seandainya modal itu dipinjamkan dan tidak diinvestasikan.

Dalam bahasan ini penghitungan investasi dan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) menggunakan data PDRB menurut penggunaan. Konsep investasi mencakup komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan inventori (Δ inventori). Berdasarkan harga konstan 2010, perkembangan nilai investasi di DIY selama periode 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 nilai investasi atas dasar harga konstan mencapai 22,29 triliun rupiah, kemudian terus meningkat menjadi 28,42 triliun rupiah pada tahun 2018 (Tabel 2.1).

Secara umum rata-rata pertumbuhan investasi di DIY selama periode 2014-2018 sebesar 6,26 persen per tahun. Hingga 2017 pertumbuhan investasi pada kisaran 4-6 persen, namun di 2018 melejit menjadi 10 persen. Hal ini sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menggelontorkan dana pembangunan infrastruktur yang cukup masif. Di antara realisasi pembangunan yang menelan investasi yang besar adalah sektor transportasi seperti bandara baru dan jalan negara yang melintas wilayah DIY bagian selatan. Selain itu pemerintah juga membangun dan merevitalisasi aset dan sarana pariwisata sebagai upaya untuk peningkatan kualitas destinasi-destinasi wisata yang ada. Struktur Investasi

Tab2.1.
Perkembangan Nilai Investasi ($I = \text{PMTB} + \Delta$ Inventori)
D.I. Yogyakarta, 2014-2018 (Juta Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	PMTB	Δ Inventori	Jumlah	PMTB	Δ Inventori	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
2014	27.744.794	980.197	28.724.991	21.358.622	930.599	22.289.222
2015	30.798.881	1.151.797	31.950.678	22.286.615	974.645	23.261.260
2016	33.428.978	1.295.788	34.724.766	23.616.948	1.045.164	24.662.112
2017*	37.111.436	1.368.184	38.479.620	24.791.862	1.066.314	25.858.176
2018**	43.173.678	1.435.491	44.609.170	27.313.862	1.104.088	28.417.951

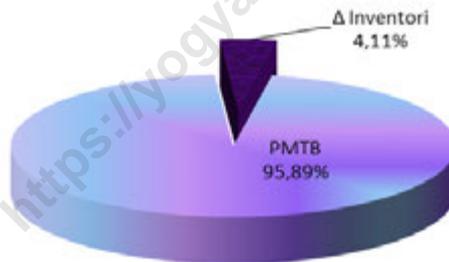
Sumber: BPS Provinsi DIY.

2. Struktur Investasi

Berdasarkan SNA, nilai investasi merupakan penjumlahan dari PMTB dan perubahan inventori. Kegiatan PMTB tercermin dari investasi fisik domestik dalam bentuk berbagai jenis barang kapital, seperti: bangunan, mesin-mesin, kendaraan atau alat angkut, hewan dan tanaman yang menghasilkan berulang (cultivated biological resources), dan peralatan lainnya. Sementara itu perubahan inventori merupakan selisih stok barang pada posisi akhir tahun dikurangi dengan posisi stok barang pada awal tahun. Perubahan inventori mencakup stok dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.

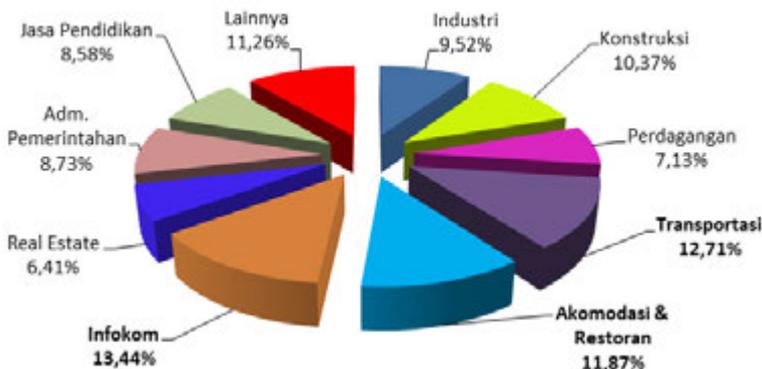
Ditinjau dari unsur penyusunnya, sebagian besar nilai investasi merupakan unsur pembentukan modal tetap bruto. Selama periode 2014-2018, rata-rata proporsi PMTB terhadap total investasi mencapai 95,89 persen sedangkan proporsi perubahan inventori hanya sebesar 4,11 persen (Gambar 4.4). Kondisi ini dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan dalam kegiatan ekonomi karena hampir seluruh dana investasi telah diwujudkan dalam bentuk investasi fisik dan hanya sebagian kecil yang masih berupa inventori

Gambar 2.1.
Proporsi PMTB terhadap Total Investasi DIY,
2014-2018



Sumber: BPS Provinsi DIY.

Gambar 2.2.
Struktur Investasi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha,
2014-2018

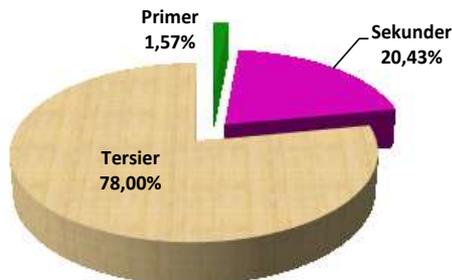


Sumber: BPS Provinsi DIY.

Selama lima tahun terakhir, aktivitas informasi dan komunikasi memimpin struktur investasi DIY dengan kontribusi sebesar 13,44 persen per tahun. Selain itu, lapangan usaha lain yang melakukan investasi yang cukup besar (dengan kontribusi di atas 10 persen) adalah transportasi dan pergudangan sebesar 12,71 persen; akomodasi dan penyediaan makan minum (11,87 persen); jasa lainnya (11,26 persen); dan konstruksi (10,37 persen). Selanjutnya, lapangan usaha lain dengan kontribusi investasi rata-rata di atas 6 persen per tahun adalah industri (9,52 persen), administrasi pemerintah dan jaminan sosial wajib (8,73 persen), jasa pendidikan (8,58 persen), perdagangan (7,13 persen), dan real estate (6,41 persen).

Menurut struktur kelompok industri, pangsa investasi terbesar berada di kelompok industri tersier, yaitu rata-rata 78,00 persen; diikuti oleh kelompok industri sekunder (20,43 persen); dan kelompok industri primer (1,57 persen). Kelompok industri primer merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, seperti usaha pertanian dan pergalian, yang sifatnya hanya mengolah sumber daya alam sehingga investasi cenderung kecil. Kelompok industri sekunder terdiri dari industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air (termasuk pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang), dan konstruksi. Selanjutnya industri tersier, atau dikenal juga sebagai industri jasa, merupakan aktivitas ekonomi yang produksinya dalam bentuk jasa, seperti perdagangan, transportasi, akomodasi dan makan-minum, informasi dan komunikasi, keuangan dan kegiatan jasa-jasa lainnya. Pangsa di atas memberi gambaran bahwa industri jasa lebih diminati investor dibanding sektor industri sekunder dan primer. Ketimpangan porsi investasi ini diharapkan tidak menjadi kemunduran fungsi dan peran sektor primer dan sekunder dalam perekonomian. Sebagian besar penduduk terutama di perdesaan masih menggantungkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Di sisi lain, sebagian penduduk dengan proporsi yang juga besar mempunyai lapangan usaha utama perdagangan dan industri pengolahan. Hal ini menjadi perhatian agar bagaimana investasi yang ditujukan untuk menggerakkan roda perekonomian DIY juga dapat dinikmati oleh mereka yang bertahan dengan aktivitas di sektor primer dan sekunder tersebut. Sehingga, tiga kelompok industri yang ada dapat bergerak bersama menopang kemajuan ekonomi DIY.

Gambar 2.3.
Struktur Investasi DIY menurut Kelompok Industri,
2014-2018



Sumber: BPS Provinsi DIY.

Tabe2.2.

Nilai Investasi (I = PMTB + Δ Inventori) D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Berlaku, 2014-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017*	2018**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	2.241.009 (7,81)	2.471.811 (7,74)	2.674.299 (7,71)	3.168.852 (8,21)	4.471.565 (10,20)	3.005.507 (8,45)
Bantul	4.464.208 (15,56)	5.042.746 (15,79)	5.461.249 (15,74)	6.035.987 (15,63)	6.469.548 (14,75)	5.494.748 (15,45)
Gunungkidul	3.516.614 (12,26)	3.838.253 (12,02)	4.206.192 (12,12)	4.600.072 (11,91)	4.952.441 (11,29)	4.222.714 (11,88)
Sleman	11.627.272 (40,53)	13.070.196 (40,93)	14.250.756 (41,08)	15.780.075 (40,87)	17.741.071 (40,46)	14.493.874 (40,76)
Yogyakarta	6.840.659 (23,84)	7.509.373 (23,52)	8.099.080 (23,35)	9.028.583 (23,38)	10.212.567 (23,29)	8.338.052 (23,45)
Jumlah	28.689.762 (100,00)	31.932.378 (100,00)	34.691.577 (100,00)	38.613.568 (100,00)	43.847.192 (100,00)	35.554.895 (100,00)

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Keterangan: *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara
() angka dalam kurung, share terhadap total.

Tabel 2.3.

Nilai Investasi (I = PMTB + Δ Inventori) D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan 2010, 2014-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	1.707.632 (7,66)	1.779.537 (7,65)	1.889.487 (7,68)	2.098.402 (8,01)	2.844.157 (10,00)	2.063.843 (8,27)
Bantul	3.474.115 (15,58)	3.639.678 (15,65)	3.858.792 (15,68)	4.044.875 (15,43)	4.204.380 (14,78)	3.844.368 (15,40)
Gunungkidul	2.711.059 (12,16)	2.834.167 (12,18)	2.996.611 (12,18)	3.160.949 (12,06)	3.289.864 (11,57)	2.998.530 (12,01)
Sleman	9.053.826 (40,60)	9.462.039 (40,67)	9.926.997 (40,34)	10.589.943 (40,41)	11.260.350 (39,60)	10.058.631 (40,29)
Yogyakarta	5.353.640 (24,01)	5.548.038 (23,85)	5.936.481 (24,12)	6.313.547 (24,09)	6.839.440 (24,05)	5.998.229 (24,03)
Jumlah	22.300.272 (100,00)	23.263.461 (100,00)	24.608.368 (100,00)	26.207.715 (100,00)	28.438.191 (100,00)	24.963.601 (100,00)

Sumber: BPS DIY.

Keterangan: *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara
() angka dalam kurung, share terhadap total.

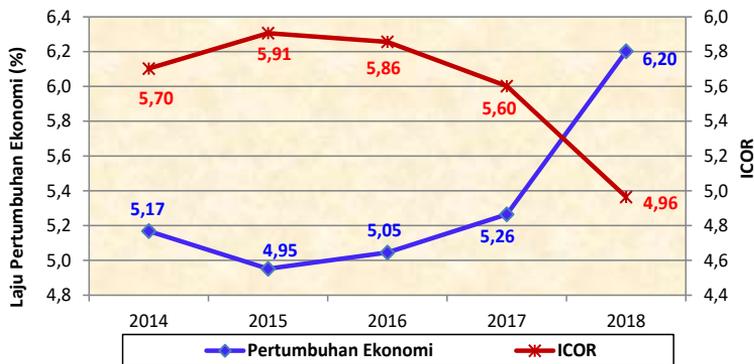
Dilihat menurut spasial wilayah, rata-rata investasi per tahun tertinggi selama periode 2014-2018 dicapai oleh Kabupaten Sleman dengan nilai sebesar 14,5 triliun rupiah, atau sekitar 40,8 persen terhadap total investasi di DIY. Sementara investasi yang tercatat di Kota Yogyakarta sebesar 8,3 triliun rupiah (23,5 persen), Kabupaten Bantul 5,49 triliun rupiah (15,5 persen), Kabupaten Gunungkidul 4,22 triliun rupiah (11,9 persen), dan terendah di Kabupaten Kulon Progo 3,01 triliun rupiah (8,5 persen). Selama lima tahun terakhir struktur investasi secara spasial relatif stabil, tidak ada pergeseran proporsi distribusi yang signifikan di antara lima kabupaten/kota.

3. Angka ICOR DIY

ICOR merupakan ukuran yang menyatakan besarnya tambahan modal yang diperlukan untuk meningkatkan satu satuan output dalam perekonomian suatu wilayah. Nilai ICOR bisa menjadi salah satu indikator tingkat efisiensi perekonomian suatu wilayah atau efisiensi penggunaan tambahan kapital dalam menghasilkan tambahan satu satuan output. Semakin kecil nilai ICOR menunjukkan bahwa kemampuan investasi untuk menghasilkan output semakin besar. Secara umum angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran nilai 3-4 (Widodo, 1990). Pada sektor yang bersifat *capital intensive*, ICOR yang tinggi menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan investasi. Sebaliknya, jika angka ICOR berada pada level ideal berarti bahwa aktivitas ekonomi yang berkembang cenderung bersifat *labour intensive* yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja dan juga mesin sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Pada tahun 2014-2017 nilai ICOR DIY per tahun relatif tinggi, di atas level 5 (lima) dan pada tahun 2018 nilainya menurun hingga di bawah level 5 (lima). Pada tahun 2014 sebesar 5,70 dan meningkat menjadi 5,91 pada tahun 2015. Selanjutnya, mulai tahun 2016 mengalami penurunan hingga mencapai level 4,96 pada tahun 2018. Dengan demikian, untuk meningkatkan output sebesar satu satuan pada tahun 2018

Gambar 2.4.
Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY,
2014-2018



Sumber: BPS Provinsi DIY.

maka diperlukan tambahan modal atau investasi sebesar 4,96 satuan. Sementara itu tambahan investasi yang diperlukan untuk menambah output sebesar 1 satuan pada tahun 2014 adalah sebesar 5,70 satuan. Jika mengacu pada teori yang ada maka penurunan nilai ICOR tersebut menunjukkan bahwa kegiatan investasi pada tahun 2018 lebih efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Angka ICOR di atas adalah penghitungan secara total. Penghitungan ICOR juga dapat dilakukan untuk level kabupaten/kota. Pada level kabupaten/kota, ICOR tertinggi pada tahun 2018 terjadi di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 5,62. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,21; Kota Yogyakarta sebesar 5,03; Kabupaten Bantul sebesar 4,45; dan terendah Kabupaten Kulon Progo sebesar 3,84.

Nilai ICOR Kabupaten Sleman yang relatif tinggi antara lain disebabkan oleh jenis investasi yang ditanamkan biasanya bersifat padat modal. Hal ini berkait dengan lapangan usaha yang dominan di Kabupaten Sleman, yaitu industri pengolahan, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Meskipun industri pengolahan di wilayah Sleman masih didominasi oleh industri makanan dan minuman, namun peranan industri tekstil dan pakaian jadi juga cukup besar. Industri tekstil sendiri pada umumnya lebih bersifat *capital intensive*. Selanjutnya pada lapangan usaha konstruksi didominasi oleh pembangunan hotel berbintang juga yang masih cukup banyak selama lima tahun terakhir. Selain itu, peranan lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang bersifat padat modal di wilayah ini juga cukup besar yang bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya nilai ICOR.

Sebaliknya, Kabupaten Kulon Progo menjadi wilayah dengan yang mempunyai nilai ICOR terendah pada tahun ini. Masifnya pembangunan bandara selama semester kedua tahun 2018 menyebabkan pertumbuhan konstruksi yang cukup tinggi dan membutuhkan investasi yang besar. Kondisi ini juga menyebabkan pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo yang awalnya didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan; dan industri pengolahan maka tahun 2018 menjadi didominasi oleh pertanian; kehutanan; dan perikanan; konstruksi; dan perdagangan. Nilai ICOR sebesar 3,84 berarti bahwa kegiatan investasi di Kabupaten Kulon Progo lebih efisien dibandingkan wilayah lain di DIY.

Tab2.4.
ICOR Kabupaten/Kota se-DIY Dengan Pendekatan
Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2014-2018

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017*	2018**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	6,50	6,41	6,32	5,34	3,84	5,68
Bantul	4,88	4,94	4,90	4,84	4,45	4,80
Gunungkidul	5,86	5,53	5,51	5,40	5,21	5,50
Sleman	6,73	6,83	6,77	6,71	5,62	6,53
Yogyakarta	5,01	5,11	5,19	5,12	5,03	5,09
D.I. Yogyakarta	5,70	5,91	5,86	5,60	4,96	5,61

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Dalam kurun waktu 2014-2018, rata-rata ICOR Kabupaten Sleman mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 6,53; diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 5,68; Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,50; Kota Yogyakarta 5,09; dan terendah adalah Kabupaten Bantul sebesar 4,80 (Tabel 2.4). Perubahan yang cukup signifikan terhadap urutan besaran ICOR kabupaten/kota terutama untuk Kabupaten Kulon Progo nampak di 2018 sebagai dampak mulainya pembangunan megaprojek bandara baru dengan total nilai investasi yang cukup besar. Selain investasi untuk pembangunan bandara itu sendiri, keberadaan bandara baru juga turut serta mengundang datangnya investor baru dari kegiatan ekonomi yang lain sebagai penunjang bandara, misalnya penyediaan akomodasi dan makan/minum, transportasi dan pergudangan, perdagangan, dan lain-lain.

Tabel 2.5.
ICOR Kabupaten/Kota di DIY dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2014-2018

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017*	2018**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	6,36	6,27	6,18	5,23	3,80	5,57
Bantul	4,69	4,75	4,71	4,66	4,28	4,62
Gunungkidul	5,60	5,28	5,26	5,15	4,96	5,25
Sleman	6,42	6,52	6,46	6,41	5,37	6,24
Yogyakarta	4,80	4,89	4,90	4,79	4,60	4,80
D.I. Yogyakarta	5,46	5,66	5,61	5,41	4,77	5,38

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Penghitungan koefisien ICOR seluruh kabupaten/kota dengan pendekatan investasi hanya terdiri dari PMTB (Investasi = PMTB) memberikan hasil nilai koefisien ICOR dengan urutan yang sama dengan penghitungan ICOR sebelumnya (Investasi = PMTB + Δ Inventori). Selama periode 2014-2018 rata-rata ICOR (Investasi = PMTB) tertinggi adalah di Kabupaten Sleman dan terendah di Kabupaten Kulon Progo.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jabalnusra, pada tahun 2018 ICOR DIY merupakan yang terendah (Tabel 2.6). Aktivitas investasi DIY yang lebih efisien dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jabalnusra antara lain disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi DIY meningkat signifikan pada tahun 2018. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa investasi yang dilakukan di DIY bukan pada sektor yang padat modal. Provinsi lain di wilayah Jabalnusra memiliki ICOR dengan kisaran angka antara 5 sampai dengan 10, kecuali NTB dengan ICOR minus 7. Nilai ICOR yang tinggi atau bertanda negatif dapat menunjukkan *inefficiency* dalam investasi di wilayah tersebut. Khusus untuk Provinsi NTB, nilai ICOR antara lain disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi pada tahun 2018 sebagai dampak dari gempa yang melanda wilayah tersebut pada bulan Agustus 2018.

Tabel 2.6.
ICOR Provinsi se-Jabalnusra (Investasi = PMTB + Δ Inventori), 2014-2018

Provinsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	8,39	8,13	7,76	7,53	7,62
Jawa Barat	6,08	5,90	5,23	5,50	5,21
Jawa Tengah	6,19	5,68	6,00	6,11	6,17
DIY	5,70	5,91	5,86	5,60	4,96
Jawa Timur	5,44	5,75	5,45	5,59	5,57
Banten	5,83	5,79	5,96	5,69	5,68
Bali	5,15	5,66	5,54	6,13	5,55
NTB	6,47	1,62	5,42	250,84	-7,03
NTT	8,83	9,58	9,99	10,78	10,53
Indonesia	7,19	7,24	7,02	7,02	7,10

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Tabel 2.7.
ICOR Provinsi se-Jabalnusra (Investasi = PMTB), 2014-2018

Provinsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	8,32	8,06	7,79	7,38	7,32
Jawa Barat	5,16	5,16	4,58	4,88	4,65
Jawa Tengah	5,76	5,56	5,82	5,93	6,00
DIY	5,46	5,66	5,61	5,37	4,77
Jawa Timur	4,93	5,31	5,21	5,35	5,35
Banten	5,65	5,73	5,96	5,68	5,67
Bali	5,05	5,64	5,51	6,10	5,52
NTB	6,36	1,60	5,34	247,51	-6,95
NTT	8,53	9,33	9,89	10,66	10,37
Indonesia	6,79	6,97	6,73	6,75	6,72

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Jika dalam penghitungan ICOR dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB dan perubahan inventori (Investasi = PMTB + Δ Inventori) diketahui bahwa ICOR DIY merupakan yang terendah maka hasil dari penghitungan ICOR dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB (Investasi = PMTB) menunjukkan bahwa ICOR DIY sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat. Pada tahun 2018 ICOR Jawa Barat (Investasi = PMTB) merupakan yang terendah, yaitu 4,65 dan DIY berada di urutan terendah kedua dengan ICOR (Investasi = PMTB) sebesar 4,77. Selanjutnya untuk provinsi lain urutannya relatif sama kecuali Jawa Timur dan Bali yang bertukar tempat (Tabel 2.7).

4. ICOR Lapangan Usaha untuk Arah Kebijakan Pembangunan Sektoral

Pembahasan ICOR di atas adalah untuk ICOR total. Oleh karena aktivitas ekonomi dalam PDRB diirnci menurut 17 lapangan usaha (industri) maka ICOR juga bisa disajikan menurut disagregasi 17 lapangan usaha. ICOR menurut lapangan usaha akan lebih bermanfaat karena memberikan petunjuk potensi dan daya saing aktivitas ekonomi mana yang akan lebih diperhatikan untuk suatu kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Metode penghitungan ICOR ada dua, yaitu metode standar dan metode akumulasi. Pada metode akumulasi, nilai investasi dan tambahan output merupakan akumulasi selama periode tertentu. Sementara itu untuk metode standar, nilai investasi dan tambahan output merupakan nilai pada waktu tertentu. Biasanya dihitung untuk tahun tertentu. Pemilihan metode penghitungan ICOR tergantung pada asumsi yang digunakan atau prediksi keadaan riil di lapangan. Misalnya karakteristik masing-masing lapangan usaha, teknologi yang digunakan, sistem manajemen, kondisi pasar, dan sebagainya. Selain itu, faktor daya tarik masing-masing lapangan usaha di mata para investor dan berbagai kebijakan serta peraturan pemerintah juga mempengaruhi perbedaan koefisien ICOR pada masing-masing lapangan usaha.

Pembahasan lebih rinci untuk kedua metode penghitungan ICOR tidak diuraikan di sini. Fokus pembahasan di sini lebih ditekankan pada analisis hasil penghitungan dengan kedua metode tersebut. Hasil perhitungan koefisien ICOR baik dengan metode standar maupun metode akumulasi menunjukkan pola yang sama (Tabel 2.8). Secara total, koefisien ICOR yang dihasilkan dari dua metode tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada periode 2014-2018. Sementara itu jika dilihat menurut masing-masing kategori, ada beberapa lapangan usaha yang menunjukkan perbedaan cukup signifikan baik lebih tinggi maupun lebih rendah.

Pada penghitungan koefisien ICOR untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan metode akumulasi menghasilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan ketika dihitung dengan metode standar. Lebih dalam lagi diketahui perbedaan yang signifikan terjadi terutama pada subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu. Seperti diketahui lapangan usaha kehutanan merupakan kegiatan yang memiliki proses produksi relatif cukup panjang, sejak penanaman hingga dapat dipetik hasilnya memerlukan waktu sekitar 10-15 tahun.

Selain pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; hasil penghitungan koefisien ICOR dengan metode akumulasi untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga menghasilkan besaran yang lebih tinggi dibandingkan hasil penghitungan dengan metode akumulasi. Demikian pula dengan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Sebaliknya, besaran koefisien ICOR untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang dihitung dengan metode akumulasi menghasilkan angka yang lebih rendah dibandingkan jika dihitung dengan metode standar. Kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan di DIY adalah penggalian yang lebih bersifat labour intensive, tidak memerlukan modal yang besar secara bersinambungan.

Tabel 2.8.
ICOR Lapangan Usaha Metode Standar dan Akumulasi,
Indeks Perkembangan PDRB, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi,
2014-2018

Lapangan Usaha	ICOR 2014-2018				Indeks Perkembangan Konstan 2018, 2010=100	LPE Rata-rata 2014-2018
	Standar			Akumulasi		
	Lag-0	Lag-1	Lag-2			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,98	2,24	2,52	4,00	111,7	1,92
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	2,02	2,23	2,47	4,26	111,1	1,97
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,55	2,74	2,95	4,63	109,5	1,09
c. Perikanan	1,59	1,69	1,81	1,62	132,8	2,65
2. Pertambangan dan Penggalian	3,19	2,89	2,52	2,89	133,1	3,55
3. Industri Pengolahan	5,03	4,39	3,73	4,93	135,5	4,50
4. Pengadaan Listrik dan Gas	14,68	12,53	10,33	15,02	165,4	5,82
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,73	4,84	3,96	5,60	124,7	3,46
6. Konstruksi	4,67	4,32	3,93	4,48	161,5	7,39
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,37	4,50	4,63	4,37	159,7	5,88
8. Transportasi dan Pergudangan	14,16	13,23	12,22	14,55	145,3	4,92
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,14	6,65	7,20	6,05	163,5	6,07
a. Penyediaan Akomodasi	3,88	4,20	4,55	3,79	202,7	9,85
b. Penyediaan Makan Minum	6,96	7,56	8,18	6,93	155,5	5,16
10. Informasi dan Komunikasi	5,78	5,16	4,51	5,74	176,0	6,51
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,93	2,86	2,76	2,86	172,1	5,53
a. Jasa Perantara Keuangan	2,37	2,27	2,16	2,37	178,7	5,43
b. Lainnya	4,38	4,29	4,16	4,39	156,1	5,83
12. Real Estate	4,56	4,46	4,33	4,54	157,4	5,41
13. Jasa Perusahaan	5,37	5,26	5,10	5,36	158,7	5,55
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,76	7,03	7,28	6,79	151,5	4,93
15. Jasa Pendidikan	4,98	5,23	5,47	4,96	158,1	5,46
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,36	5,63	5,88	5,34	168,4	5,89
17. Jasa lainnya	5,18	5,44	5,68	5,19	157,7	6,41
PDRB	5,61	5,50	5,31	5,56	151,6	5,36

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Pada Tabel 2.8 juga disajikan perkembangan nilai tambah menurut lapangan usaha dengan tahun dasar 2010. Pada tahun 2018, indeks perkembangan PDRB DIY mencapai 151,60 persen. Hal ini berarti selama kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir perekonomian di DIY meningkat sebesar 51,60 persen dibandingkan kondisi tahun 2010. Dari 17 kategori, ada beberapa lapangan usaha yang berkembang relatif lebih pesat dibandingkan lapangan usaha lain. Misalnya lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum untuk subkategori penyediaan akomodasi dengan indeks perkembangan sebesar 202,70 persen. Artinya selama 8 (delapan) tahun terakhir nilai tambah untuk kegiatan penyediaan akomodasi meningkat menjadi dua kali lipat. Selain itu, kegiatan jasa keuangan dan asuransi terutama subkategori jasa perantara keuangan juga meningkat cukup pesat mencapai 178,70 persen. Demikian pula untuk lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan indeks perkembangan mencapai 176 persen. Sementara itu untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; indeks perkembangannya masih di bawah 150 persen. Terutama pertanian, kehutanan, dan perikanan nilai tambahnya selama periode 2010-2018 hanya sebesar 111,70 persen.

5. Kebutuhan dan Pilihan Investasi Mendatang

Berdasarkan hasil penghitungan ICOR pada periode 2014-2018 dengan menggunakan metode standar, dengan pendekatan investasi merupakan penjumlahan dari PMTB dan perubahan inventori ($\text{Investasi} = \text{PMTB} + \Delta \text{Inventori}$), maka akan dilakukan penghitungan untuk mengetahui kebutuhan investasi selama periode 2019-2022. Target pertumbuhan ekonomi DIY dan kabupaten/kota diperoleh dari buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2020. Hasil penghitungan kebutuhan investasi berdasarkan target pertumbuhan ekonomi di DIY dan masing-masing kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.9 sampai dengan Tabel 2.14.

Tabel 2.9.
Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2019-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					ADH Konstan (Juta Rupiah)	ADH Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	5,87	103.777.345	5.750.782	31,07	32.239.809	53.412.582
2020	6,03	110.037.243	6.259.898	31,89	35.093.996	61.362.589
2021	6,18	116.835.028	6.797.785	32,62	38.109.480	70.327.245
2022	6,32	124.217.794	7.382.766	33,32	41.388.979	80.611.132

Catatan:

ICOR Standar 2014-2018	:	5,61
Implisit investasi 2018	:	156,98
PDRB Konstan 2018	:	98.026.564
Asumsi Laju Implisit	:	5,54

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Tabel 2.10.
Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulonprogo, 2019-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					ADH Konstan (Juta Rupiah)	ADH Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	7,90	8.340.205	610.636	41,61	3.470.291	5.739.141
2020	7,95	9.003.251	663.046	41,85	3.768.143	6.555.162
2021	7,97	9.720.811	717.559	41,95	4.077.943	7.462.293
2022	8,00	10.498.475	777.665	42,10	4.419.529	8.507.112

Catatan:

ICOR Standar 2014-2018	:	5,68
Implisit investasi 2018	:	157,22
PDRB Konstan 2018	:	7.729.569
Asumsi Laju Implisit	:	5,19

Sumber: BPS Provinsi DIY.

ICOR DIY selama periode 2014-2018 sebesar 5,61 per tahun dengan asumsi laju implisit sebesar 5,54 persen per tahun. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi DIY ditargetnya sebesar 5,87 persen. Untuk mencapai target tersebut maka diperlukan investasi sebesar 53,41 triliun rupiah. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,03 persen sehingga diperlukan investasi sebesar 61,36 triliun rupiah. Pada tahun 2021, dengan target pertumbuhan sebesar 6,18 persen maka dibutuhkan investasi sebesar 70,33 triliun rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022 investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,32 persen adalah sebesar 80,61 triliun rupiah (Tabel 2.9).

Selama periode 2014-2018, ICOR rata-rata untuk Kabupaten Kulon Progo adalah sebesar 5,68 dan asumsi laju implisit sebesar 5,19 persen. Dengan demikian, untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 7,90 persen pada tahun 2019 maka dibutuhkan investasi sebesar 5,74 triliun rupiah. Selanjutnya, jika pada tahun 2020 ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,95 persen maka dibutuhkan dana investasi sebesar 6,56 triliun rupiah. Sementara itu nilai investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,97 persen (2021) dan 8,00 persen (2022) masing-masing adalah sebesar 7,46 triliun rupiah dan 8,51 triliun rupiah (Tabel 2.10).

Nilai ICOR rata-rata Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir, seperti yang terlihat di Tabel 2.11, sebesar 4,80 dan asumsi laju implisit sebesar 5,29 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 persen pada tahun 2019 diperlukan investasi sebesar 8,19 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2020-2022 target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai berturut-turut adalah sebesar 5,95 persen; 6,10 persen; dan 6,20 persen. Untuk mencapai target tersebut maka pemerintah Kabupaten Bantul memerlukan tambahan investasi masing-masing sebesar 9,36 triliun rupiah (2020); 10,70 triliun rupiah (2021); dan 12,15 triliun rupiah (2022).

Tabel 2.11.
Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, 2019-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	Δ Y (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					ADH Konstan (Juta Rupiah)	ADH Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	5,80	19.203.628	1.052.751	26,32	5.055.128	8.190.129
2020	5,95	20.346.244	1.142.616	26,97	5.486.644	9.359.485
2021	6,10	21.587.365	1.241.121	27,61	5.959.649	10.704.153
2022	6,20	22.925.781	1.338.417	28,03	6.426.846	12.153.912

Catatan:

ICOR Standar 2014-2018	:	4,80
Implisit investasi 2018	:	153,88
PDRB Konstan 2018	:	18.150.877
Asumsi Laju Implisit	:	5,29

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Tabel 2.12.
Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Gunungkidul, 2019-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	Δ Y (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					ADH Konstan (Juta Rupiah)	ADH Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	5,50	13.625.199	710.318	28,69	3.908.521	6.150.184
2020	5,70	14.401.836	776.636	29,67	4.273.435	7.028.896
2021	5,80	15.237.142	835.306	30,16	4.596.267	7.902.229
2022	6,05	16.158.989	921.847	31,39	5.072.456	9.115.847

Catatan:

ICOR Standar 2014-2018	:	5,50
Implisit investasi 2018	:	150,54
PDRB Konstan 2018	:	12.914.881
Asumsi Laju Implisit	:	4,53

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Kabupaten Gunungkidul mempunyai rata-rata ICOR sebesar 5,50 selama tahun 2014-2018 dan asumsi laju implisit sebesar 4,53 persen. Pada tahun 2019 target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah sebesar 5,50 persen. Dengan demikian, diperlukan investasi sebesar 6,15 triliun rupiah. Selanjutnya untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 5,70 pada tahun 2020 maka investasi yang diperlukan sebesar 7,03 triliun rupiah. Untuk periode 2021-2022, pemerintah Kabupaten Gunungkidul menargetkan pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut sebesar 5,80 persen dan 6,05 persen. Untuk mencapai target tersebut diperlukan investasi masing-masing sekitar 7,90 triliun rupiah dan 9,12 triliun rupiah (Tabel 2.12).

Selama periode 2014-2018 ICOR rata-rata Kabupaten Sleman sebesar 6,53 dan asumsi laju implisit sebesar 5,74. Target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2019 adalah sebesar 5,90 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, investasi yang dibutuhkan adalah sebesar 21,28 triliun rupiah (Tabel 2.13). Selanjutnya pada tahun 2020, target pertumbuhan ekonomi diharapkan sebesar 6,05 persen sehingga investasi yang dibutuhkan adalah sebesar 24,44 triliun rupiah. Sementara itu dalam periode 2021-2022 ditetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan berturut-turut sebesar 6,15 persen dan 6,24 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut diperlukan investasi masing-masing sebesar 27,86 triliun rupiah (2021) dan 31,75 triliun rupiah (2022).

Di Kota Yogyakarta, ICOR rata-rata lima tahun terakhir sebesar 5,09 dan asumsi laju inflasi sebesar 4,77 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada tahun 2019 diperlukan investasi sebesar 11,35 triliun rupiah. Selanjutnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen pada tahun 2020 maka investasi yang diperlukan adalah sebesar 13,00 triliun rupiah. Pada tahun 2021, Kota Yogyakarta menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90 persen. Target pertumbuhan tersebut dapat dicapai dengan menambah investasi sebesar 15,02 triliun

rupiah. Sementara itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10 persen pada tahun 2022 diperlukan investasi 17,23 triliun rupiah (Tabel 2.14).

Tabel 2.13.
Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, 2019-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	Δ Y (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					ADH Konstan (Juta Rupiah)	ADH Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	5,90	35.094.418	1.955.213	36,40	12.774.610	21.282.071
2020	6,05	37.217.630	2.123.212	37,27	13.872.252	24.437.204
2021	6,15	39.506.515	2.288.884	37,85	14.954.689	27.856.094
2022	6,24	41.973.673	2.467.158	38,40	16.119.463	31.749.122

Catatan:

ICOR Standar 2014-2018	:	6,53
Implisit investasi 2018	:	157,55
PDRB Konstan 2018	:	33.139.205
Asumsi Laju Implisit	:	5,74

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Tabel 2.14.
Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, 2019-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	Δ Y (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					ADH Konstan (Juta Rupiah)	ADH Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	5,45	27.552.664	1.424.012	26,33	7.253.566	11.347.592
2020	5,65	29.109.389	1.556.725	27,24	7.929.578	12.996.908
2021	5,90	30.826.843	1.717.454	28,38	8.748.289	15.022.801
2022	6,10	32.707.281	1.880.437	29,29	9.578.487	17.233.064

Catatan:

ICOR Standar 2014-2018	:	5,09
Implisit investasi 2018	:	149,32
PDRB Konstan 2018	:	26.128.652
Asumsi Laju Implisit	:	4,77

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, karena anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota relatif terbatas. Oleh karena itu, pihak swasta dan rumah tangga diharapkan turut berperan dalam penanaman modal di wilayah DIY. Untuk menarik minat investor swasta baik dari dalam maupun luar provinsi serta luar negeri, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi pada suatu sektor ekonomi. Beberapa hal berikut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi. Pertama, prioritas untuk melakukan investasi dilakukan pada lapangan usaha dengan koefisien ICOR kecil. Dari sisi ekonomi, lapangan usaha ini menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Kedua, lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja yang besar. Meskipun mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi, lapangan usaha ini bisa menjadi prioritas dalam berinvestasi. Investasi pada lapangan usaha ini akan membantu mengatasi masalah pengangguran di wilayah tersebut. Ketiga, lapangan usaha yang mempunyai *backward* dan *forward linkages* tinggi. Investasi pada lapangan usaha tersebut akan mempunyai *multiplier effect* yang relatif lebih besar. Investasi pada lapangan usaha ini akan menciptakan pasar bagi komoditi lainnya, sehingga akan menggerakkan perekonomian wilayah. Keempat, lapangan usaha yang mempunyai potensi pasar cukup besar. Selain itu, pilihan investasi juga harus mempertimbangkan kepemilikan sumber daya (*resource endowments*) lokal, kebijakan pemerintah mengenai konservasi sumber daya alam, dan faktor lainnya.

Tabel 2.15.
Penyerapan Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2014 dan 2018

Lapangan Usaha	Tenaga Kerja (orang)		Penyerapan Tenaga Kerja (%)	
	2014	2018	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	496.967	432.057	25,41	20,40
2. Pertambangan dan Penggalian	13.614	18.772	0,70	0,89
3. Industri Pengolahan	284.376	346.919	14,54	16,38
4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.224	6.028	0,11	0,28
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.661	5.283	0,19	0,25
6. Konstruksi	146.349	160.636	7,48	7,58
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	387.729	393.305	19,82	18,57
8. Transportasi dan Pergudangan	52.528	76.344	2,69	3,60
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	134.401	207.788	6,87	9,81
10. Informasi dan Komunikasi	14.585	16.217	0,75	0,77
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	31.615	34.382	1,62	1,62
12. Real Estate	4.487	1.956	0,23	0,09
13. Jasa Perusahaan	40.937	49.970	2,09	2,36
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	64.440	73.888	3,29	3,49
15. Jasa Pendidikan	116.901	118.129	5,98	5,58
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31.395	35.184	1,61	1,66
17. Jasa lainnya	129.834	141.534	6,64	6,68
Total	1.956.043	2.118.392	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY.

Hasil penghitungan ICOR selama periode 2014-2018 menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; serta real estate mempunyai besaran ICOR yang relatif rendah (di bawah 4). Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 dan 2018 untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang relatif tinggi dengan proporsi di atas 14 persen (Tabel 2.15). Selanjutnya dilihat dari dampak penggandanya (multiplier effects) maka lapangan kerja industri pengolahan mempunyai dampak pengganda yang relatif tinggi (BPS DIY dan BAPPEDA DIY, 2012).

Berdasarkan beberapa indikator di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor bisa dijadikan prioritas utama investasi. Hal ini karena lapangan usaha tersebut mempunyai ICOR yang relatif rendah, penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, serta perkembangannya yang relatif pesat. Prioritas investasi berikutnya adalah pada usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan karena mempunyai ICOR yang relatif rendah, kemampuan menyerap tenaga kerja tinggi, serta ketersediaan sumber daya lahan dan air yang relatif memadai di DIY. Selanjutnya, lapangan usaha industri pengolahan bisa menjadi prioritas investasi berikutnya. Angka ICOR industri pengolahan relatif rendah dan mempunyai serapan tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu sebesar 14,54 persen pada tahun 2014 dan 16,38 persen pada tahun 2018. Di samping itu, berdasarkan penghitungan Tabel Input Output DIY 2010, industri pengolahan mempunyai forward linkages dan backward linkages yang relatif tinggi.

Lapangan usaha jasa pendidikan juga bisa menjadi prioritas investasi lainnya, karena mempunyai serapan tenaga kerja yang cukup tinggi dengan besaran ICOR yang relatif rendah, yaitu 4,26. Apalagi DIY sudah sejak dulu terkenal sebagai salah satu daerah tujuan untuk menuntut ilmu. Demikian pula lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dan konstruksi juga dapat menjadi alternatif pemilihan investasi karena mempunyai serapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan besaran ICOR relatif rendah. Selanjutnya jika pertimbangan utama hanya nilai ICOR maka lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; dan real estate bisa dijadikan pilihan dalam melakukan investasi di DIY.

Di sisi lain, lapangan usaha pertambangan dan penggalian meskipun mempunyai nilai ICOR yang relatif rendah tidak direkomendasikan untuk menjadi pilihan prioritas investasi karena potensi sumber daya alam tambang dan mineral relatif kecil. Potensi lapangan usaha ini sebagian besar berupa bahan galian batu dan pasir. Selain potensi yang relatif kecil, isu kerusakan lingkungan menjadi salah satu alasan untuk tidak terlalu mengembangkan kegiatan penggalian. Seperti diketahui bahwa kegiatan penggalian ini bisa mengganggu keseimbangan alam sehingga diperlukan upaya untuk melindungi daerah aliran sungai (DAS).

Pertimbangan lain untuk melakukan investasi selain dari nilai ICOR dan serapan tenaga kerja adalah potensi ekonomi wilayah tersebut. Salah satu indikator untuk melihat

Tabel 2.16.
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja menurut Kategori di DIY, 2016

Kategori	Usaha/Perusahaan		Tenaga Kerja	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	188.517	35,32	339.810	25,69
Industri pengolahan	146.440	27,44	375.475	28,39
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	93.012	17,43	183.410	13,87
Lainnya	105.701	19,81	423.847	32,05
Jumlah	533.670	100,00	1.322.542	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2016)

Tabel 2.17.
Sebaran Perusahaan/Usaha Nonpertanian di DIY menurut Skala Usaha, 2016

Skala Usaha	Perusahaan/Usaha (Unit)		Tenaga Kerja (Orang)	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usaha Mikro-Kecil (UMK)	524.935	98,36	1.044.498	78,98
Usaha Menengah-Besar (UMB)	8.735	1,64	278.044	21,02
Jumlah	533.670	100,00	1.322.542	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2016)

potensi ekonomi suatu wilayah dengan melihat jumlah kegiatan usaha di wilayah itu. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) ada tiga kategori kegiatan ekonomi yang cukup dominan di DIY. Ketiga kategori tersebut adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (35,32 persen); kategori industri pengolahan (27,44 persen); dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum (17,43 persen). Tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan usaha tersebut masing-masing sebesar 25,69 persen, 28,38 persen, dan 13,87 persen. Konsep tenaga kerja di sini adalah jumlah orang yang bekerja pada lapangan usaha di DIY, baik penduduk DIY maupun luar DIY. Data Sensus Ekonomi 2016 mencakup semua lapangan usaha selain pertanian.

Berdasarkan skala usaha, investasi sebaiknya diprioritaskan pada skala usaha mikro dan kecil (UMK). Hasil SE2016 menunjukkan bahwa UMK mendominasi perekonomian DIY dengan kontribusi mencapai 98,36 persen, sedangkan usaha menengah dan besar (UMB) persentasenya kurang dari dua persen dari jumlah seluruh usaha. Dari sisi ketenagakerjaan, UMK mempunyai keunggulan dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah melimpah dan tidak banyak memerlukan spesifikasi keahlian. Kondisi ini bisa menjadi peluang bagi stakeholder untuk memberikan pembinaan ketrampilan teknis usaha.

Secara spasial, jumlah perusahaan/usaha masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul (Gambar 2.5). Total perusahaan atau usaha nonpertanian di D.I. Yogyakarta ada sebanyak 533.670 unit. Sekitar 27,25 persen di antaranya berada di Kabupaten Sleman, sebesar 26,49 persen berlokasi di Kabupaten Bantul, dan sebesar 21,06 persen berada di Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu sisanya tersebar di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo masing-masing sebesar 13,08 persen. Tingginya proporsi usaha nonpertanian di Kabupaten Gunungkidul terkait penggunaan konsep dan definisi usaha nonpertanian dimana usaha pembuatan galek dianggap sebagai kegiatan nonpertanian.

Terkait dengan kegiatan investasi, sudah semestinya kegiatan investasi diarahkan ke seluruh wilayah D.I. Yogyakarta sehingga pemerataan kegiatan ekonomi antar wilayah sesuai dengan potensi masing-masing dapat dicapai. Dengan pemerataan tersebut diharapkan mampu mempercepat dalam mendorong roda perekonomian D.I. Yogyakarta agar kegiatan ekonomi dapat menguat di seluruh penjuru wilayah sehingga dapat berdampak positif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat

Gambar 2.5.
Distribusi Usaha/Perusahaan Nonpertanian di DIY
menurut Kabupaten/Kota, 2016 (persen)



Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2016)

TEMA 3 KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN

<https://yogyakarta.bps.go.id>

TEMA 3

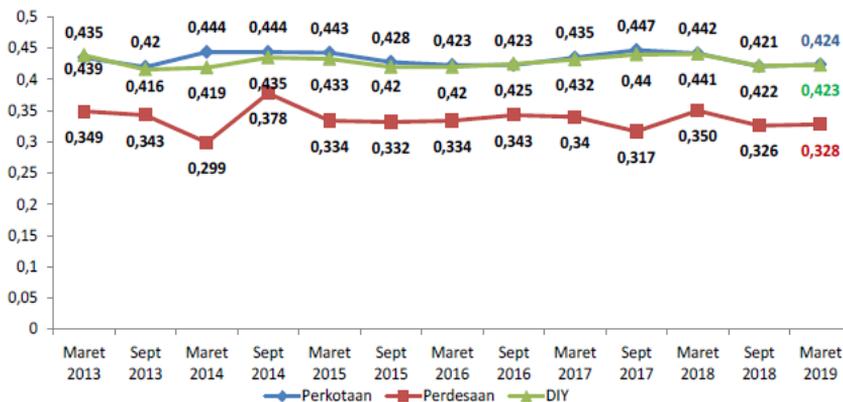
Ketimpangan dan Kemiskinan

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh penduduk secara seimbang. Gini Rasio (Rasio Gini) merupakan salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakteraturan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Nilai Gini Rasio berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1. Nilai Gini Ratio mendekati nol bermakna semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatan atau berarti pula semakin meratanya distribusi pendapatan antarpenduduk. Sebaliknya, Gini Ratio semakin mendekati satu menunjukkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat.

Mencermati perkembangan angka ketimpangan/ketidakteraturan dengan Gini Rasio DIY dalam rentang waktu 2013 hingga 2019 masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan, yakni selalu di atas level 0,4. Selama periode tersebut angka Gini Rasio berfluktuasi di sekitaran desimal kedua. Ketimpangan pendapatan yang diterima antarpenduduk tercatat masih dalam kategori moderat, tetapi posisinya berada di moderat atas. Ketimpangan pendapatan DIY tertinggi pada kondisi September 2017 yang menembus angka 0,447. Meskipun demikian dalam periode setahun terakhir terjadi perbaikan tingkat ketimpangan pendapatan, Gini Rasio Maret 2018 sebesar 0,441 turun menjadi 0,423 di

Gambar 3.1.
Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY,
Maret 2013 - Maret 2019



Maret 2019 atau turun 0,018 poin. Ketimpangan pendapatan antarpenduduk di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan atau dengan kata lain distribusi pendapatan di perdesaan lebih merata. Hal ini terkait dengan karakteristik sosial ekonomi terutama lapangan usaha serta tingkat upah di wilayah perkotaan yang lebih heterogen mulai dari sektor formal sampai sektor informal. Perbedaan level ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan di DIY juga relatif besar. Secara umum, level Gini Rasio DIY menggambarkan adanya ketimpangan pendapatan antarpenduduk yang cukup lebar.

Tabel 3.1.
Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY dan Indonesia,
Maret 2018 – Maret 2019

Wilayah/Waktu	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Daerah Istimewa Yogyakarta			
Maret 2018	0,442	0,350	0,441
September 2018	0,421	0,326	0,422
Maret 2019	0,424	0,328	0,423
Indonesia			
Maret 2018	0,401	0,324	0,389
September 2018	0,391	0,319	0,384
Maret 2019	0,392	0,317	0,382

Sumber : Susenas Maret 2018 - Maret 2019

Berdasarkan Tabel 3.1, terlihat bahwa di daerah perkotaan, tingkat ketimpangan dalam periode satu tahun terakhir mengalami penurunan (Maret 2018 ke Maret 2019) sebesar 0,018 poin. Demikian pula di daerah perdesaan, selama setahun terakhir tingkat ketimpangan juga turun 0,022 poin. Dengan demikian penurunan angka ketimpangan secara umum didukung oleh penurunan ketimpangan di perkotaan maupun perdesaan.

Selain Gini Rasio, ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang menggunakan pendekatan data dasar yang sama, yaitu pengeluaran per kapita, adalah Kriteria Bank Dunia (KBD). Berdasarkan indikator ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan “tinggi” jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan “sedang” jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan “rendah” jika angkanya berada di atas 17 persen.

Hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019, menunjukkan bahwa 40 persen penduduk kelompok pengeluaran terendah di D.I. Yogyakarta mendapat porsi konsumsi sebanyak 15,36 persen dari total konsumsi yang dilakukan oleh seluruh penduduk DIY. Sehingga, dengan menggunakan ukuran ketimpangan KBD posisi ketimpangan di DIY di level sedang, sama dengan level di Gini Rasio.

Tabel 3.2.
Distribusi Pengeluaran Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta
Maret 2018 - Maret 2019 (Persen)

Daerah	Periode	Kelompok Penduduk		
		40% Berpengeluaran Rendah	40% Berpengeluaran Menengah	20% Berpengeluaran Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	Maret 2018	14,32	35,63	50,05
	September 2018	14,80	37,36	47,48
	Maret 2019	15,00	36,81	48,19
Perdesaan	Maret 2018	19,47	37,84	42,69
	September 2018	20,66	39,07	40,26
	Maret 2019	19,73	39,82	40,45
Perkotaan dan Perdesaan	Maret 2018	14,83	34,38	50,79
	September 2018	15,65	35,03	49,32
	Maret 2019	15,36	35,76	48,88

Sumber : Susenas Maret 2018 - Maret 2019

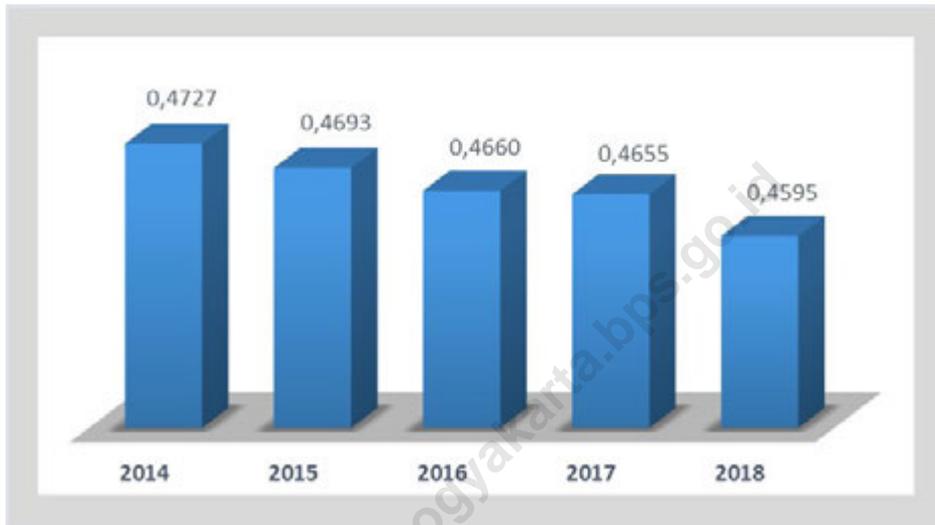
Pada Maret 2019, 40 persen kelompok pengeluaran terbawah di perkotaan mengkonsumsi 15 persen dari total pengeluaran perkotaan. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan Maret 2018 yang besarnya 14,32 persen. Sementara itu, 40 persen kelompok pengeluaran terbawah di perdesaan pada Maret 2019 mengkonsumsi 19,73 persen dari total pengeluaran di perdesaan. Angka ini juga meningkat dibanding Maret 2018 yang sebesar 19,47 persen. Analisis ini hanya membandingkan kondisi Maret dengan Maret karena surveinya mempunyai cakupan dan jumlah sampel yang terbandingkan, sehingga untuk September 2018 akan dibandingkan dengan September 2019 yang datanya belum tersedia.

2. Ketimpangan Antarwilayah

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan antarwilayah (regional) adalah Indeks Williamsson. Indeks ini menggunakan data dasar PDRB per kapita dan penduduk sehingga indeks yang tersedia kondisi 2018. Ketimpangan pendapatan regional selama periode 2014-2018 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari 0,473 pada tahun 2014 menjadi 0,459 pada tahun 2018 (Gambar 3.2). Penurunan ini menggambarkan ketimpangan pendapatan antarregional di DIY yang semakin berkurang. Namun demikian, level ketimpangan pendapatannya tercatat masih cukup tinggi yakni di batas atas kriteria moderat. Penurunan indeks ketimpangan yang cukup tinggi terjadi selama 2017-2018 yang dipengaruhi oleh aktivitas investasi di wilayah pinggiran DIY terutama di Kulon Progo dan Gunungkidul.

Perkembangan angka Indeks Williamson nampak semakin menurun. Hal ini mencerminkan ketimpangan antarwilayah di DIY semakin berkurang yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menyusun perencanaan dan merealisasikan dengan implementasi pembangunan yang tepat sasaran.

Gambar 3.2.
Indeks Williamson DIY, 2014-2018



3. Perkembangan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan *basic need approach* untuk menghitung tingkat kemiskinan. Selanjutnya, tingkat kemiskinan ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun GKNM menunjukkan banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Garis kemiskinan yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan jumlah penduduk miskin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil pendataan Susenas Maret 2019, besaran Garis Kemiskinan DIY adalah Rp432.026 per kapita per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5,44 persen jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan pada Maret 2018 yang besarnya Rp Rp409.744. Kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga (inflasi) komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan perubahan jenis komoditas barang atau jasa yang dikonsumsi.

Berdasarkan komponen penyusunnya, komoditas makanan masih memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penentuan GK. Pada Maret 2019, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang besarnya Rp 310.947 per kapita per bulan memberikan sumbangan sebesar 71,97 persen terhadap pembentukan GK. Adapun Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang tercatat sebesar Rp 121.079 memberikan kontribusi sebesar 28,03 persen terhadap GK.

Tabel 3.3.
Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah Maret 2018 - Maret 2019

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2018	301 252	125 328	426 580
September 2018	305 495	126 523	432 018
Maret 2019	323 635	128 992	452 628
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2018	270 706	95 550	366 256
September 2018	271 415	98 191	369 606
Maret 2019	279 124	99 749	378 873
<u>Kota+Desa</u>			
Maret 2018	292 472	117 272	409 744
September 2018	296 077	118 822	414 899
Maret 2019	310 947	121 079	432 026

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018, September 2018, Maret 2019

Pada Maret 2019, GK di daerah perkotaan tercatat sebesar Rp452.628 per kapita per bulan. Sementara itu, pada saat yang sama, GK di perdesaan sebesar Rp378.873 per kapita per bulan. Secara umum, tingkat konsumsi penduduk di perkotaan lebih tinggi daripada tingkat konsumsi di perdesaan. Kondisi tersebut juga tercermin dari GK yang lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan.

Dilihat proporsi antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan, nampak bahwa garis kemiskinan makanan lebih dominan dari garis kemiskinan non makanan. Proporsi garis kemiskinan makanan mencapai 71,97 persen, sementara non makanan hanya 28,03 persen dari garis kemiskinan DIY kondisi Maret 2019.

Dalam setahun terakhir, persentase penduduk miskin (P_0) DIY mengalami penurunan. Di DIY penduduk miskin paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY tercatat sebanyak 304,66 ribu orang atau lebih dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 143,81 ribu orang. Meskipun demikian, secara persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan, angkanya mencapai 13,89. Sementara itu, pada saat yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,89 persen.

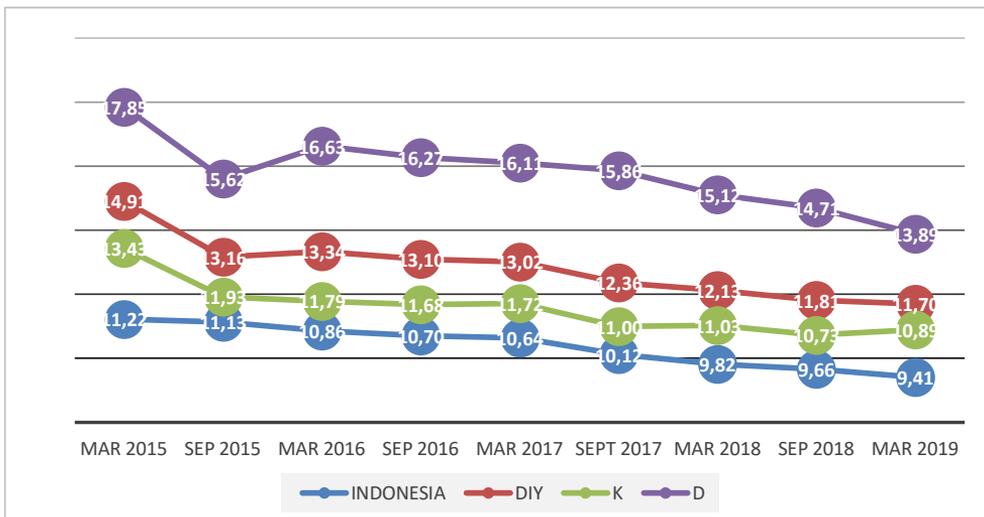
Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin perkotaan tercatat sebanyak 305,24 ribu orang. Selanjutnya, pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 304,66 ribu orang. Secara persentase, tingkat kemiskinan di perkotaan juga menunjukkan pola yang sama dengan pergerakan jumlah penduduk miskin secara absolut. Pada Maret 2018, persentase penduduk miskin sebanyak 11,03 persen. Kemudian, pada Maret 2019, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk perkotaan turun menjadi 10,89 persen, atau berkurang sebesar 0,14 poin persen.

Sementara itu, persentase kemiskinan di perdesaan juga menurun. Selama satu tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 154,86 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 143,81 ribu orang di Maret 2019. Penurunan juga terlihat pada persentase penduduk miskin di perdesaan dari Maret 2018 sebesar 15,12 persen menjadi 13,89 persen di Maret 2019.

Selama periode 2015-2019 persentase penduduk DIY cenderung semakin menurun mengikuti tren penurunan di tingkat nasional. Meskipun demikian persentase penduduk miskin DIY masih di atas rata-rata nasional. Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan DIY juga masih di atas rata-rata kemiskinan nasional. Oleh karena itu, masih perlu kerja keras bagi DIY untuk mendorong laju penurunan penduduk miskin dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Berbagai upaya pun secara serius terus digalakkan. mulai dari pembentukan tim penanggulangan kemiskinan daerah yang terdiri dari Bank Indonesia, instansi pemerintah daerah dan pusat yang terkait, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur-unsur lainnya. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu implementasinya yang ditujukan agar masyarakat berperan serta langsung dalam program pengentasan kemiskinan.

Indikator lain yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran kemiskinan

Gambar 3.3.
Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2015 – 2019



adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P_1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P_2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P_1 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada Maret 2018, indeks P_1 tercatat sebesar 2,065. Pada Maret 2019, nilai indeks P_1 turun menjadi 1,741. Dengan indeks P_1 yang semakin menurun menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Dengan semakin berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan maka upaya pengentasan kemiskinan relatif menjadi semakin mudah.

Perbedaan kualitas kemiskinan bisa juga dilihat antara perdesaan dan perkotaan. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan. Namun demikian, laju penurunan indeks P_1 di perdesaan lebih signifikan dan mempunyai kecenderungan turun secara konsisten. Selain itu, terlihat pula bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan semakin mendekati tingkat kedalaman kemiskinan di perkotaan. Pada Maret 2018, indeks P_1 di perkotaan sebesar 1,910, selanjutnya turun menjadi 1,725 pada kondisi Maret 2019. Sementara indeks P_1 perdesaan pada periode yang sama menunjukkan penurunan yang konsisten, dari 2,484 Maret 2018 menjadi 1,783 pada Maret 2019.

Tabel 3.4.
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
di D.I. Yogyakarta Menurut Daerah, Maret 2018 - Maret 2019**

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</u>			
Maret 2018	1,910	2,484	2,065
September 2018	1,577	1,846	1,650
Maret 2019	1,725	1,783	1,741
<u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)</u>			
Maret 2018	0,471	0,593	0,504
September 2018	0,353	0,337	0,349
Maret 2019	0,408	0,317	0,384

Sumber : BPS, Susenas Maret 2018, September 2018, Maret 2019

Sejalan dengan perkembangan indeks P_1 , indeks P_2 juga menunjukkan penurunan pada kurun waktu yang sama. P_2 pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,504. Selanjutnya, nilai indeks P_2 turun menjadi 0,384 di kondisi Maret 2019. Dengan demikian secara keseluruhan tingkat kesenjangan di antara penduduk miskin menunjukkan adanya penurunan.

Kondisi yang sama juga terjadi bila dibandingkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Tingkat kesenjangan antara penduduk miskin menunjukkan tren yang menurun. Indeks P_2 Maret 2018 di perkotaan sebesar 0,471, selanjutnya pada Maret 2019, indeks P_2 turun menjadi 0,408. Sementara itu, di wilayah perdesaan, indeks P_2 justru menunjukkan penurunan, dari 0,504 kondisi Maret 2018 turun menjadi 0,317 pada Maret 2019.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

TEMA 4 DERAJAT PEMBANGUNAN MANUSIA

<https://yogyakarta.bps.go.id>

TEMA 4

Derajat Pembangunan Manusia

Salah satu sasaran utama pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dan masyarakat. Secara eksplisit, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2017-2022.

Selain itu, indikator-indikator yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan IPM juga ditargetkan meningkat, seperti rata-rata lama sekolah, rasio angka partisipasi kasar antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Selain tercantum dalam sasaran pembangunan manusia dan masyarakat, IPM juga menjadi target dalam sasaran pembangunan wilayah dan antarwilayah. Pemerintah Daerah menargetkan peningkatan IPM wilayah selatan DIY, yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Ketiga kabupaten tersebut mendapat prioritas khusus untuk meningkatkan capaian pembangunan manusia. Hal ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan manusia dan mewujudkan pemerataan pembangunan bagi penduduk dan wilayahnya.

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan manusia yang akan dicapai, pemerintah menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan; meningkatnya kompetensi siswa dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja, dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

1. Perkembangan dan Posisi Pembangunan Manusia DIY

Sampai saat ini capaian pembangunan manusia DIY belum merata. Di tingkat provinsi level angka IPM DIY adalah kategori tinggi. Sementara di tingkat kabupaten/kota, ada yang sudah mencapai kategori sangat tinggi (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman), namun ada yang masih di kategori sedang (Kabupaten Gunungkidul). IPM DIY tahun 2018 berada pada posisi 79,53. Secara umum, capaian posisi ini terus mengalami kemajuan dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 79,53 pada tahun 2018 (Gambar 4.1). Artinya, setiap tahun IPM DIY rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen. Perkembangan posisi IPM ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Level IPM DIY selama periode

2010-2018 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Dibandingkan dengan level IPM nasional, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi. Sejak tahun 2010 sampai 2018, capaian IPM DIY selalu menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia.

Capaian IPM DIY sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang semakin membaik dari tahun ke tahun (Tabel 4.1).

Gambar 4.1.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia DIY dan Indonesia, 2010-2018



Tabel 4.1.

Indeks Pembangunan Manusia DIY menurut Komponen, 2014-2018

Komponen	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,50	74,68	74,71	74,74	74,82
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,85	15,03	15,23	15,42	15,56
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,84	9,00	9,12	9,19	9,32
Pengeluaran Riil per Kapita Setahun	Rp 000	12 294	12 684	13 229	13 521	13 946
IPM		76,81	77,59	78,38	78,89	79,53
Pertumbuhan IPM	%	0,48	1,02	1,01	0,65	0,81

2. Kualitas Hidup

Indikator ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2014-2018, UHH penduduk DIY telah meningkat dari 74,50 tahun menjadi 74,82 tahun. Artinya, terjadi peningkatan usia harapan hidup pada saat lahir sebesar 0,32 tahun atau tumbuh sebesar 0,11 persen per tahun. UHH sebesar 74,82 tahun menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2018 hingga akhir hayatnya dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dibandingkan dengan rata-rata secara nasional, level UHH penduduk DIY tercatat lebih tinggi dan menempati peringkat tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Tingginya level capaian UHH DIY maupun peningkatannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan kesehatan dasar yang murah, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk; peningkatan usia perkawinan pertama bagi wanita; peningkatan pendidikan wanita usia subur; peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tata cara perawatan selama kehamilan; penanganan proses persalinan, dan pasca kelahiran. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap berkurangnya kasus kejadian kematian bayi dan balita di seluruh wilayah DIY dalam beberapa dekade terakhir dan berimbas pada kenaikan usia harapan hidup.

3. Kualitas Pengetahuan

Kedua indikator, baik harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah tercatat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menggambarkan kualitas pendidikan penduduk DIY yang semakin membaik.

Harapan Lama Sekolah penduduk DIY meningkat secara nyata dari 14,85 tahun di tahun 2010 menjadi 15,56 tahun di tahun 2018. Artinya, terjadi kenaikan lama sekolah sebesar 0,71 tahun. Harapan lama sekolah sebesar 15,56 tahun ini menggambarkan perkiraan lamanya tahun sekolah yang akan dijalani oleh anak-anak usia 7 tahun yang sudah setara dengan jenjang pendidikan D3 atau D4/S1. Secara level, harapan lama sekolah penduduk DIY tercatat paling tinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Tingginya capaian dan peningkatan harapan lama sekolah penduduk didorong oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan tingkat menengah dan tinggi yang cukup representatif, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk serta level kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat.

Capaian indikator rata-rata lama sekolah penduduk DIY pada tahun 2018 mencapai 9,32 tahun. Angka ini menggambarkan rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk DIY berusia 25 tahun ke atas yang sudah setara dengan lulus pada jenjang SMP. Rata-rata lama sekolah penduduk ini meningkat cukup nyata jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yang mencapai 8,84 tahun. Artinya, ada peningkatan level sebesar 0,48 tahun selama periode 2014-2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia DIY yang lebih baik. Secara nasional, rata-rata lama sekolah penduduk DIY termasuk dalam kelompok

enam provinsi yang memiliki level tertinggi.

4. Standar Hidup yang Layak

Pengeluaran per kapita riil penduduk DIY yang disesuaikan mencapai level Rp13,95 juta selama tahun 2018. Angka ini semakin meningkat selama periode 2014-2018 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 3,2 persen. Peningkatan ini menggambarkan standar kehidupan penduduk yang semakin membaik, artinya kualitas kesejahteraannya semakin meningkat. Secara level, pengeluaran riil perkapita penduduk DIY tercatat berada di peringkat ketiga tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Tingginya level pengeluaran riil per kapita ini dipengaruhi oleh pola konsumsi penduduk DIY yang lebih bervariasi serta tingkat harga komoditas barang dan jasa yang secara relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga komoditas yang sama di provinsi lain. Dengan kata lain, daya beli penduduk DIY lebih tinggi dari provinsi lainnya.

5. Capaian IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY

Pencapaian pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2018 cukup bervariasi. Level IPM pada tingkat kabupaten/kota berkisar antara 69,24 hingga 86,11. Capaian IPM Kota Yogyakarta sebesar 86,11 dan tercatat paling tinggi di antara seluruh kabupaten/kota di DIY, bahkan di Indonesia. Level capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman sebesar 83,42. IPM kedua daerah ini termasuk dalam kategori “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). IPM Kabupaten Bantul (79,45) dan Kulon Progo (73,76) termasuk dalam kategori “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$). Sementara, IPM Kabupaten Gunungkidul (69,24) berada dalam kategori “sedang” ($60 \leq IPM < 70$).

Indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota juga terlihat lebih bervariasi. Pada dimensi umur yang panjang dan sehat, indikator usia harapan hidup saat lahir berkisar antara 73,66 tahun (Bantul) hingga 75,12 tahun (Kulon Progo). Usia harapan hidup Kabupaten Kulon Progo tercatat paling tinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 12,95 tahun (Gunungkidul) hingga 17,05 tahun (Kota Yogyakarta). Harapan lama sekolah Kota Yogyakarta juga tercatat paling tinggi di Indonesia. Rata-rata lama sekolah berkisar antara 7,00 tahun (Gunungkidul) hingga 11,44 tahun (Kota Yogyakarta). Sementara, pengeluaran per kapita riil pada tingkat kabupaten/kota di DIY berkisar antara Rp9,16 juta per tahun (Gunungkidul) hingga Rp18,63 juta per tahun (Kota Yogyakarta).

Kemajuan pembangunan manusia sampai tahun 2018 dapat terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat kecepatan pertumbuhannya. Kulon Progo sejak tahun 2013 naik level dari status “sedang” menjadi “tinggi”. Sleman sejak tahun 2011 sudah naik level dari status “tinggi” menjadi “sangat tinggi”. Sementara itu, tiga wilayah lain tidak mengalami perubahan status. Bantul tetap berada pada status “tinggi”, Gunungkidul masih tetap di status “sedang”, dan Kota Yogyakarta sejak 2010 sudah masuk status “sangat tinggi”. Selama periode 2010-2018, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Meskipun dari sisi level capaian paling rendah, Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo tercatat memiliki

pertumbuhan atau tingkat kemajuan yang paling cepat. Rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama periode 2010-2018 di kedua daerah masing-masing tercatat sebesar 0,95 dan 0,87. Sebaliknya, meskipun secara level IPM paling tinggi tingkat kemajuan/pertumbuhan IPM di Kota Yogyakarta dan Sleman tercatat lebih lambat.

Tabel 6.11. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2017-2018

Kabupaten/ Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulon Progo	75,06	75,12	14,23	14,24	8,64	8,65	9 277	9 698	73,23	73,76
Bantul	73,56	73,66	14,74	15,03	9,20	9,35	14 995	15 386	78,67	79,45
Gunungkidul	73,82	73,92	12,94	12,95	6,99	7,00	8 788	9 163	68,73	69,24
Sleman	74,63	74,69	16,48	16,71	10,65	10,66	15 365	15 844	82,85	83,42
Yogyakarta	74,35	74,45	16,82	17,05	11,43	11,44	18 005	18 629	85,49	86,11
DIY	74,74	74,82	15,42	15,56	9,19	9,32	13 521	13 946	78,89	79,53

6. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemajuan Pembangunan Manusia

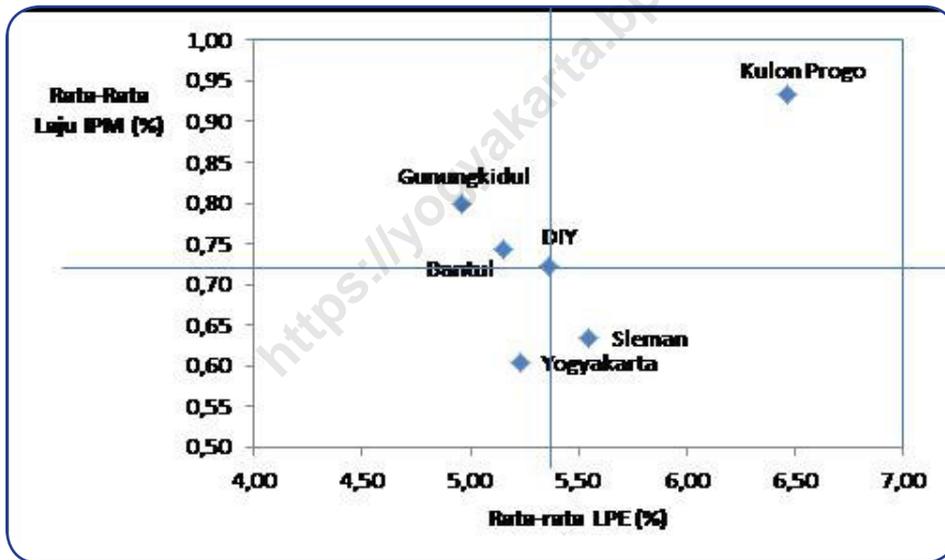
Gambar 4.2 menunjukkan plot kabupaten/kota di DIY berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama kurun waktu 2014-2018 dengan penjelasan sebagai berikut. **Pertama**, Bantul dan Gunungkidul terletak di kuadran IV, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan peningkatan IPM juga di bawah rata-rata provinsi (*low-growth, pro human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa Bantul dan Gunungkidul akselerasi pembangunan manusia melaju lebih cepat di atas rata-rata provinsi. Namun, dari sisi pertumbuhan ekonomi akselerasinya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal ini berarti pula bahwa selama lima tahun terakhir konsentrasi pembangunan lebih menitikberatkan pada pembangunan manusia. Untuk itu di masa yang akan datang pembangunan ekonomi diharapkan juga bisa dipacu lebih cepat lagi.

Kedua, Kabupaten Sleman memiliki kondisi sebaliknya, yaitu pertumbuhan ekonomi mampu dipacu di atas rata-rata provinsi namun akselerasi pembangunan manusia di bawah rata-rata provinsi. Klasifikasi dalam Tipologi Klassen ada di kuadran IV (*high growth, less-pro human development*). Hal ini mencerminkan bahwa dalam lima tahun terakhir akselerasi pembangunan ekonomi Sleman mampu dipacu di atas rata-rata provinsi, namun sisi pembangunan manusia akselerasinya di bawah rata-rata provinsi.

Ketiga, Kota Yogyakarta sebagai ibukota provinsi dari sisi perekonomian dan pembangunan manusia jauh lebih maju dibanding kabupaten/kota lain. Sehingga, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia selama lima tahun terakhir tidak secepat kabupaten/kota lain yang sedang dipacu untuk mengejar ketertinggalannya.

Keempat, Komitmen pemerintah untuk mengangkat ketertinggalan di sisi wilayah DIY telah secara nyata mengangkat pembangunan ekonomi dan juga pembangunan manusia di Kulon Progo. Selama lima tahun terakhir akselerasi pembangunan ekonomi Kulon Progo mampu dipacu melebihi rata-rata provinsi. Demikian pula pembangunan manusia juga mampu dipacu sehingga tumbuh di atas rata-rata provinsi. Dalam Tipologi Klassen Kulon Progo berada di Kuadran I (*high growth, pro human development*).

Gambar 4.2.
Plot Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota di DIY, 2014-2018



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Lingkar Selatan (Jl. Brawijaya) Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta
Telp. (0274) 4342234 (Hunting) Fax. (0274) 4342230
Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id> Email: bps3400@mailhost.bps.go.id